

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

---



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

## KATA PENGANTAR

Seiring puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2020.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Kisaran. Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Kisaran Tahun 2020, maka rata-rata capaian IKU KPKNL Kisaran Tahun 2020 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 102,46 % dari 12 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU.

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Kisaran, Januari 2021  
Kepala Kantor,

Untung Sudarwanto  
NIP 19730227 199903 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2020, dari Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran yang terdiri dari 12 Sasaran Strategis (SS) dan 20 IKU, sebanyak 18 IKU berstatus hijau (memenuhi ekspektasi) dan 2 IKU berstatus merah (tidak memenuhi ekspektasi) dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,46%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2020 secara ringkas, yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	54,57%	54,57%
	Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDK s.d 2016)	3%	31,95%	1065%
	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	100%
Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75	4,89	102,95%
Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	62,28%	62,28%
Manajemen pelayanan yang berkualitas	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85	98,70	116,12%
Tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase bidang tanah yang disertifikatkan	100%	123,53%	123,53%
	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	106,25%	106,25%
	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	117,61%	117,61%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	100%	108,82%	108,82%
Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0%	200%
Tata kelola lelang yang efektif	Persentase produktivitas lelang	34%	48,34%	142,18%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	98,82%	109,80%
Edukasi yang Efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	89	93,09	104,59%
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	100%	125%
	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN	100%	100%	100%
SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
Organisasi yang <i>fit-for purpose</i>	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	83,53	119,33%
	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	96,42	120,52%
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,53%	103,72%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kisaran akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Peran dan tugas yang diamanahkan kepada DJKN tersebut dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban KPKNL Kisaran dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari KPKNL Kisaran sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis KPKNL Kisaran.

#### B. Tugas dan Fungsi

KPKNL Kisaran merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi KPKNL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara
5. pelaksanaan pelayanan penilaian
6. pelaksanaan pelayanan lelang
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan
12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang
14. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL Kisaran senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional dan Akuntabel Untuk  
Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”***

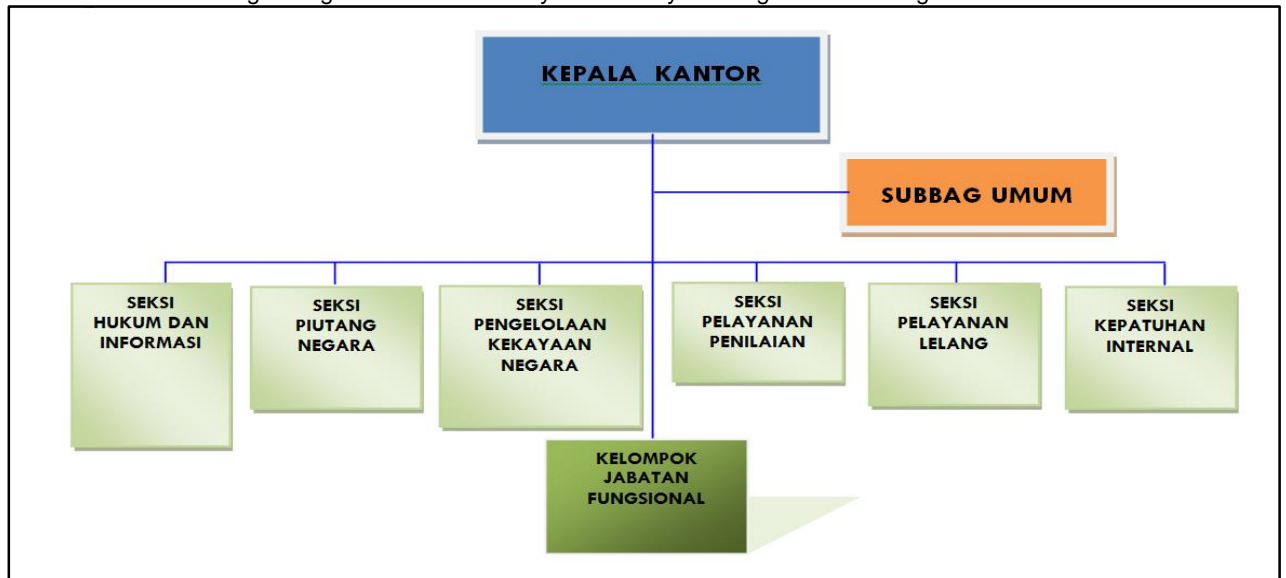
### **C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Pelayanan Penilaian;
4. Seksi Piutang Negara
5. Seksi Pelayanan Lelang
6. Seksi Kepatuhan Internal
7. Seksi Hukum dan Informasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi KPKNL Kisaran disajikan dalam gambar 1.1 di bawah ini:

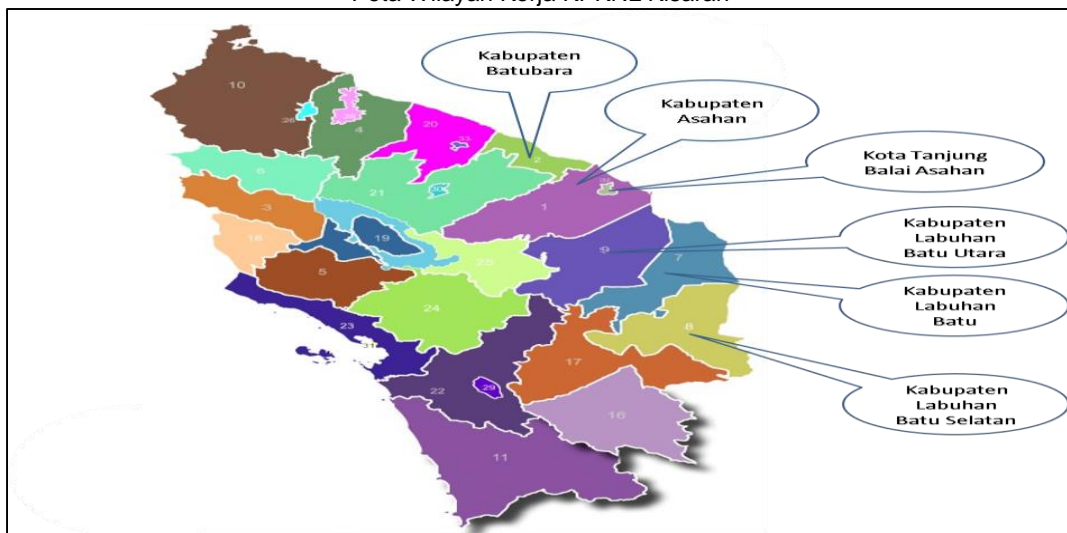
Gambar 1.1  
Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran



Wilayah kerja KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran terdiri dari 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Asahan;
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kota Tanjungbalai;
4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kabupaten Labuhanbatu
6. Kabupaten Batubara

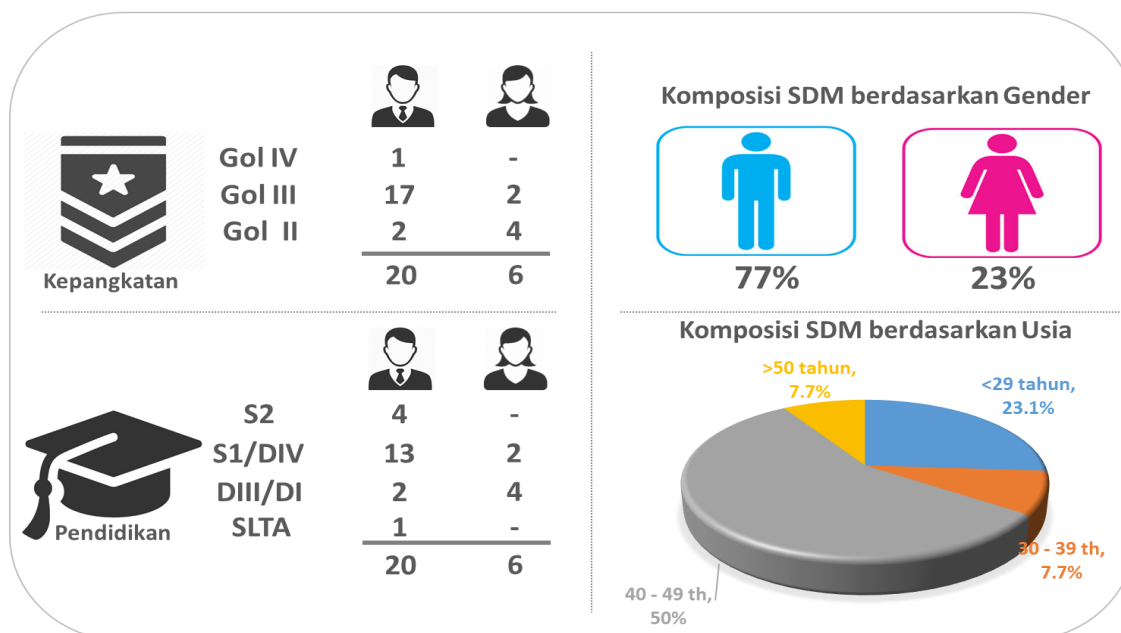
Gambar 1.2  
Peta Wilayah Kerja KPKNL Kisaran



KPKNL Kisaran didukung oleh 26 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai KPKNL Kisaran Berdasarkan Jabatan dan Golongan

### SUMBER DAYA MANUSIA



## D. Isu Strategis

- Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan stakeholders di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor-7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Mengingat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan dirasakan selama beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai

dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Respons tersebut berupa strategi-strategi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dirumuskan untuk mencapai kondisi-kondisi yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra DJKN 2020-2024.

- c. Selain dari sisi arah kebijakan dan strategi, target pada indikator kinerja juga harus mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target kinerja sehingga diperoleh proyeksi yang lebih realistis, mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

## E. Sistematika Laporan

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

### 2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### 3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020.

### 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Kisaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2020;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja KPKNL Kisaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**5. Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Kisaran serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2020 yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja, KPKNL Kisaran berpedoman pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Rencana strategis tersebut memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. KPKNL Kisaran memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu:

**'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Kisaran menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Kisaran sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien;

Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Kisaran mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi KPKNL Kisaran tahun 2020-2024 dalam

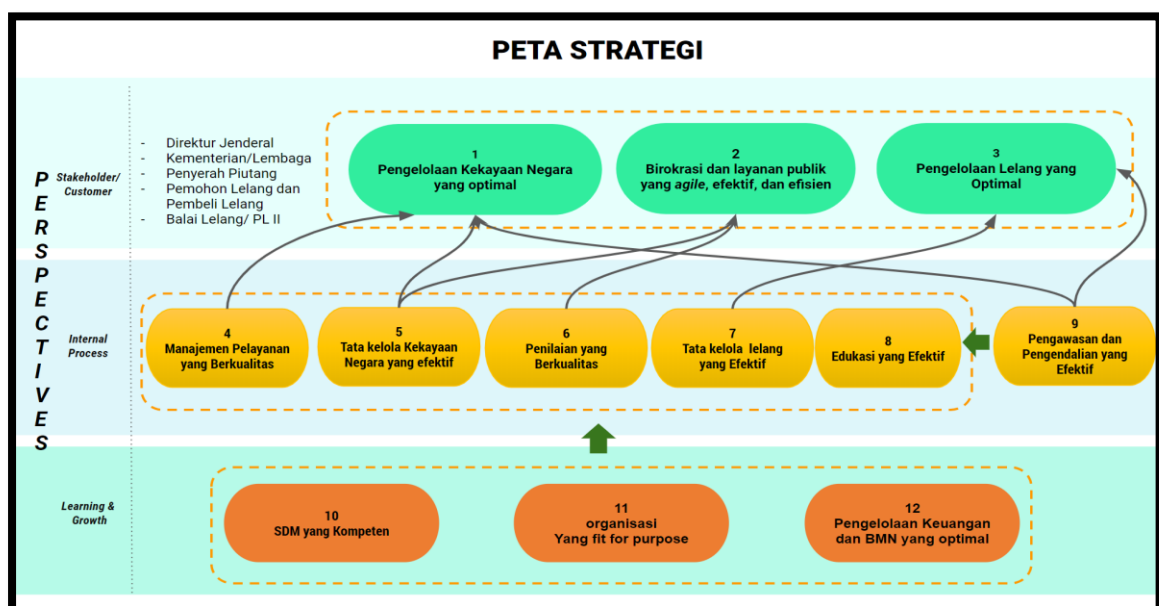
rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan social adalah:
  - Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, social, dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - Organisasi dan SDM yang optimal;
  - Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - Komunikasi public yang efektif.

## B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, perjanjian kinerja dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Kisaran Tahun 2020 yang tertuang dalam bentuk peta strategi KPKNL Kisaran.

Gambar 2.1  
Peta Strategi KPKNL Kisaran 2020



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three*, KPKNL Kisaran pada tahun 2020 menerapkan 3 perspektif, 12 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020.

### **Stakeholder/Customer Perspective**

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder/customer. Dalam perspektif ini terdapat 3 sasaran strategis :

#### **Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh DJKN meliputi tugas pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan kekayaan negara lain-lain, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong penerimaan negara dan penghematan belanja.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.1

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.1. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
1.2. Tingkat penurunan outstanding piutang negara	%	3
1.3. Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	%	100

#### **Sasaran Strategis 2 : Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien**

Pelayanan public yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan public yang meliputi standar pelayanan, maklumat

pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu faktor yang merepresentasikan kualitas layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Ruang lingkup layanan yang diuji tingkat kepuasannya adalah layanan yang diberikan kepada pihak eksternal. Kualitas layanan dapat dikatakan prima adalah ketika layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,75

Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Lelang yang Optimal

Pengelolaan lelang yang optimal adalah pelaksanaan lelang yang mengedepankan aspek kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang, dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari pelaksanaan lelang oleh KPKNL dan Pegadaian. Penghitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1. Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	%	100

### ***Internal Process Perspective***

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

Sasaran Strategis 4 : Manajemen pelayanan yang berkualitas

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai prosedur, dan menghasilkan output yang diinginkan oleh pengguna layanan. Ruang lingkup pelayanan meliputi pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan unit pendukung kepada pihak eksternal maupun internal. Selain itu pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai prosedur, dan menghasilkan output yang diinginkan oleh pengguna layanan. Ruang lingkup pelayanan meliputi pelayanan di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara lain-lain (KNL), kekayaan negara dipisahkan (KND), penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan unit pendukung kepada pihak eksternal maupun internal.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1 Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	85

Sasaran Strategis 5 : Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan BMN, KNL, KND, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 4 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	Persentase	100
5.2. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	Persentase	100
5.3. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	Persentase	100
5.4. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Persentase	100

#### Sasaran Strategis 6 : Penilaian yang berkualitas

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memebrikan suatu opini atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum, diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, serta dapat digunakan oleh pemohon.pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait asset yang dinilai.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.6

Tabel 2.6  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Persentase	30

#### Sasaran 7 : Tata kelola lelang yang efektif

Tata kelola lelang dapat dikatakan efektif jika proses lelang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah good governance serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7

Tabel 2.7

## IKU KPKNL Kisaran pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1 Persentase produktivitas lelang	Persentase	34
7.2 Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Persentase	90

## Sasaran Strategis 8 : Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi,
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.8

Tabel 2.8  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	Indeks	89

## Sasaran Strategis 9 : Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan

pengendalian dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan mitigasi risiko yang selesai dijalankan untuk setiap risiko yang ada pada sasaran strategis. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman terjadinya hambatan dalam pencapaian tujuan bahkan kerugian.

Mitigasi merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi probabilitas tingkat risiko. Mitigasi risiko dinyatakan selesai apabila rencana mitigasi suatu risiko sudah selesai dilaksanakan seluruhnya.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.9

Tabel 2.9  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1 Persentase tindak lanjut pengelolaan asset	Persentase	80
9.2 Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN	Persentase	100

### ***Learning and Growth Perspective***

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

Sasaran Strategis 10 : SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkompentensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka memberikan dukungan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.10

Tabel 2.10  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.10

Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase	100

Sasaran Strategis 11 : Organisasi yang *fit-for-purpose*

Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.11

Tabel 2.11  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.11

Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.1 Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	Indeks	70
11.2 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	Indeks	80

Sasaran Strategis 12 : Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakain dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.12

Tabel 2.12  
IKU KPKNL Kisaran pada SS. 12

Indikator Kinerja	Satuan	Target
12.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	95

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2020, KPKNL Kisaran berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Tabel 2.13  
Perjanjian Kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2020
1	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat penurunan outstanding piutang negara	3%
		1c-CP	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2	<b>Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien</b>	2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75 (skala 5)
3	<b>Pengelolaan lelang yang optimal</b>	31-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2020
4	<b>Manajemen Pelayanan Yang Berkualitas</b>	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85 (skala100)
5	<b>Tata Kelola kekayaan negara yang akuntabel</b>	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja (Portofolio Aset)	100%
6	<b>Penilaian yang berkualitas</b>	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7	<b>Tata kelola lelang yang efektif</b>	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%
8	<b>Edukasi yang efektif</b>	8a-CP	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	89
9	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>	9a-CP	Persentase tindak lanjut pengelolaan asset	80%
		9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN	100%
10	<b>SDM yang kompeten</b>	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11	<b>Organisasi yang <i>fit-to-purpose</i></b>	11a-N	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja berbasis BSC	70
		11b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80
12	<b>Pengelolaan anggaran yang berkualitas</b>	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%

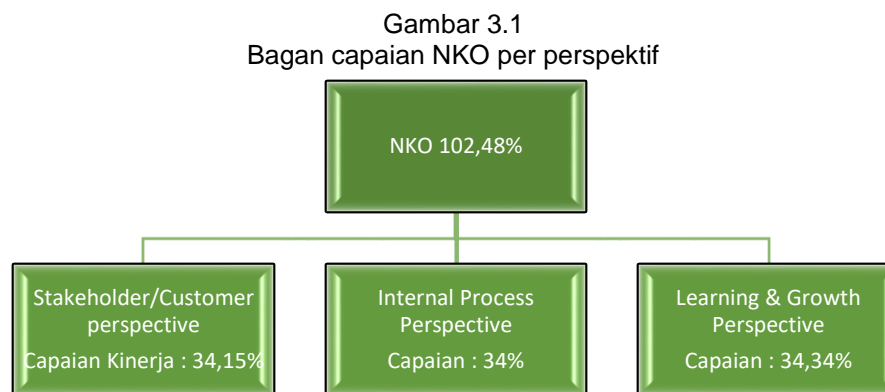
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja KPKNL Kisaran pada tahun 2020, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

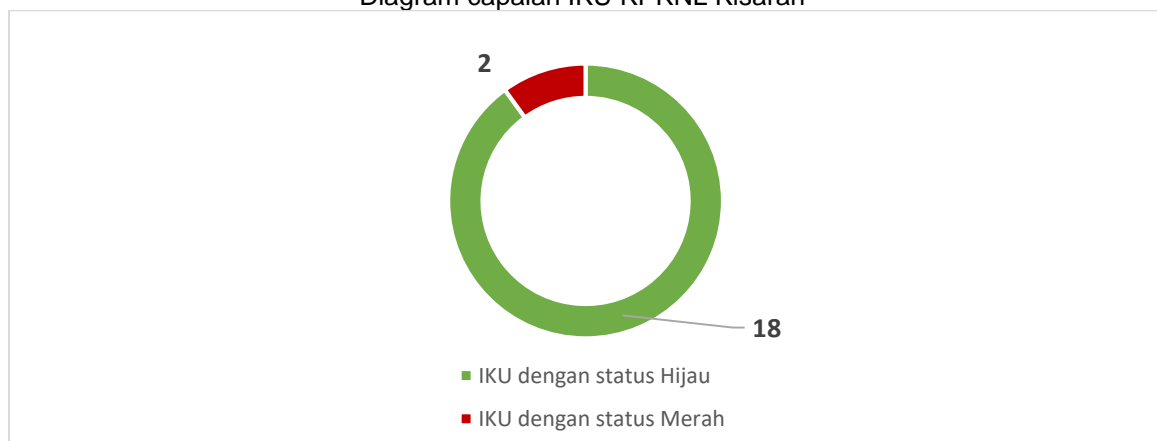
#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kisaran tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran adalah sebesar 102,48%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :



Selama tahun 2020, dari total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran, terdapat 18 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus merah.

Gambar 3.2  
Diagram capaian IKU KPKNL Kisaran



Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai KPKNL Kisaran pada tahun 2020 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL Kisaran.

### 1. (1a-CP) Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara

Indikator Kinerja	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Kinerja
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	5.004.378.000	4.104.815.940	2.239.837.586	54,57%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN
  - 1) penerimaan dari hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada K/L
- b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
  - 1) penerimaan dari pengurusan piutang negara
- c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)
  - 1) bea lelang;
  - 2) bea lelang pegadaian;
  - 3) denda keterlambatan penyeteran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
  - 4) biaya permohonan lelang;
  - 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
  - 6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
  - 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
  - 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
  - 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar Rp2.239.837.586,00 dari target setelah

addendum sebesar Rp4.104.815.940,00 atau dalam capaian persentase sebesar 54,57% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rincian Target dan Realisasi per komponen capaian  
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2020  
(dalam rupiah)

Jenis Capaian	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Persentase (Addendum)
Capaian PNB Pengelolaan BMN	3.348.378.000	2.444.315.940	1.201.805.831	49,17%
Capaian PNB PN	3.000.000	7.500.000	19.139.577	255,19%
Capaian PNB Lelang	1.653.000.000	1.653.000.000	1.018.892.178	61,64%
<b>Total</b>	<b>5.004.378.000</b>	<b>4.104.815.940</b>	<b>2.239.837.586</b>	<b>54,57%</b>

Kendala dalam pencapaian target IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang selama periode tahun 2020, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada proses bisnis Ditjen Kekayaan Negara
2. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan
3. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2020 dengan melakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Isu Utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya?)

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 54,57%.
2. Capaian atas IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang tidak mencapai target *trajectory* (tahunan).
3. Dalam rangka menghadapi target tahun 2020 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?):

Dari sisi capaian PNBPN pengelolaan BMN, terdapat kendala pada potensi aset yang ada pada satker, meskipun telah dilakukan upaya berupa koordinasi dan sosialisasi terkait pemanfaatan aset ke satker. Sedangkan dari sisi capaian PNBPN lelang, adanya situasi Covid 19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan adanya kebijakan moratorium pelaksanaan lelang selama 2 bulan yang mempengaruhi laju dan durasi akselerasi pelaksanaan lelang.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi ke satker dan stakeholder yang memiliki potensi PNBPN

Rekomendasi rencana Aksi:

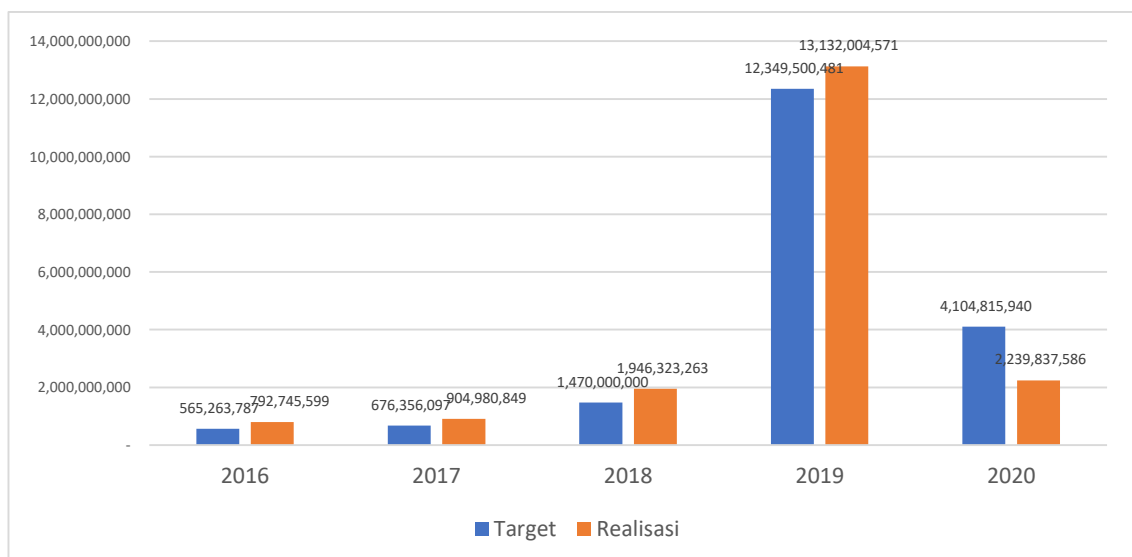
1. Melakukan koordinasi dengan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN pada bulan Januari s.d Maret 2021

Data historis target dan realisasi IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 3.2  
Perbandingan Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang  
Periode Tahun 2016 sd. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	565.263.787	676.356.097	1.470.000.000	12.349.500.481	4.104.815.940
Realisasi	792.745.599	904.9803849	1.946.323.263	13.132.004.571	2.239.837.586

Gambar 3.3  
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Manfaat Ekonomi  
Periode Tahun 2016 sd. 2020



## 2. (1b-CP) Tingkat penurunan outstanding piutang negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat outstanding piutang negara	1.916.637.018	617.111.723	32,20%

Tingkat penurunan outstanding piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dan penagihan piutang negara. Tingkat penurunan outstanding piutang negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya ditetapkan hingga 31 Desember 2016 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2020) diharapkan turun sebesar 3%.

Komponen capaian atas IKU tersebut terdiri dari kriteria:

1. Penjumlahan piutang negara dapat ditagih (PSBDT):
  - a. Angsuran
  - b. Penarikan/Pengembalian
  - c. Pelunasan
  - d. PSBDT
2. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2016 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Capaian tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja disebabkan keberhasilan upaya penagihan yang dilakukan kepada debitur baik berupa pembayaran angsuran maupun pelunasan. Sedangkan terhadap debitur yang tidak ditemukan alamat/domisilinya telah ditetapkan PSBDT.

## 3. (1c-N) Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Indikator Kinerja	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Kinerja
Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	214	167	167	100%

IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan salah satu tools untuk mendukung kegiatan pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal. Kriteria optimal dalam hal ini apabila: (i) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, dan (ii) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Capaian IKU tersebut diukur melalui total BMN pada satuan kerja yang ditargetkan selesai pengukuran SBSK-nya dibagi dengan total BMN yang dimiliki oleh satker yang bersangkutan. Untuk tahun 2020, BMN pada satuan kerja yang dijadikan target adalah satuan tanah dan/atau bangunan/gedung kantor dan rumah negara/mess pada satker Kementerian Keuangan.

Capaian IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2020 mencapai target yang ditentukan (sesuai target addendum) yaitu 167 BMN.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait SBSK;
- b. Satker belum memahami pengisian form yang dibutuhkan dalam penghitungan/kertas kerja

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada satuan kerja mengenai peraturan BMN terkait SBSK, baik yang diselenggarakan oleh KPKNL maupun yang diselenggarakan oleh satuan kerja;
- b. Melakukan edukasi dan asistensi mengenai pengisian form;

Langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2020 antara lain:

- a. Sosialisasi melalui media zoom;
- b. Asistensi ke satker;

Isu Utama dan Implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 100%.
2. Capaian atas IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan telah mencapai target *trajectory* (tahunan)

3. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait

**Akar Masalah:**

Mengingat IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan mempunyai korelasi yang erat dengan pemahaman satuan kerja, maka Seksi PKN KPKNL harus selalu melakukan bimbingan/asistensi dan mitigasi guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan.

**Tindakan yang telah dilaksanakan:**

Telah dilaksanakan sosialisasi pada Bulan September 2020

**Rekomendasi rencana aksi:**

Melakukan koordinasi dengan satker dalam rangka pengisian form kertas kerja pada bulan Maret 2021

**4. (2a-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada kantor pelayanan**

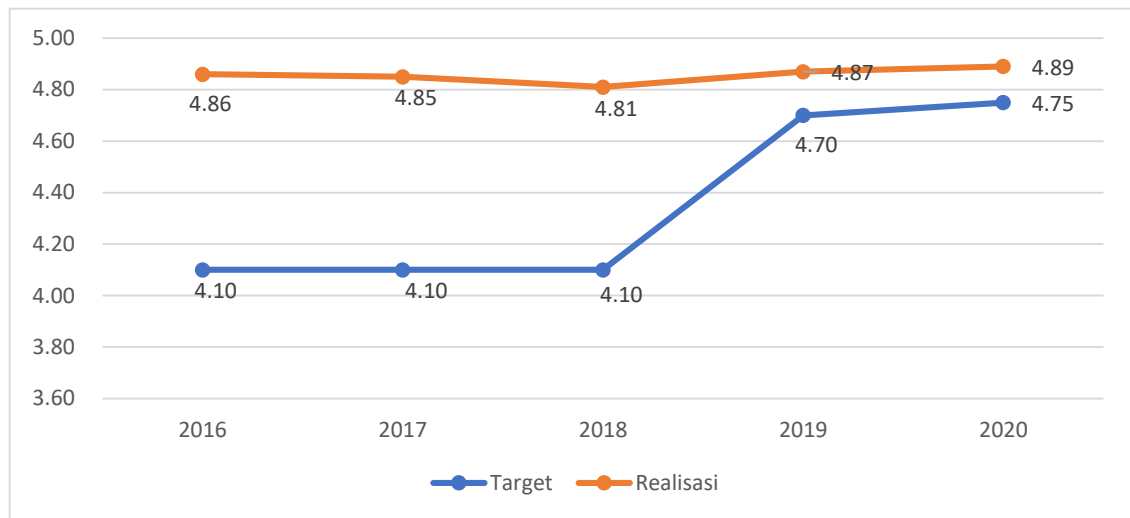
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada kantor pelayanan	4,79	4,89	102,95%

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen)

Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2020 adalah sebesar 4,89 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 4,87. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pelayanan kepada Pengguna Barang/Satuan Kerja dengan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, layanan konsultasi, dan koordinasi dengan Pengguna Barang/Satuan Kerja, dengan memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku.

Data historis target dan realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 3.4  
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan  
Periode Tahun 2016 - 2020



Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- b. Kurangnya pemahaman tentang peraturan BMN.

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi SDM baik dalam pelayanan maupun pemberian informasi;
- b. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi BMN melalui media sosial seperti *whatsapp*;
- c. Melakukan *knowledge sharing* terkait peraturan BMN dan menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) terkait permasalahan, rencana dan standarisasi pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara;
- d. Melaksanakan *Quality Assurance* di bidang pengelolaan kekayaan negara

Dan sebagai langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2019 adalah :

- a. Mengadakan diskusi mengenai standarisasi pelayanan kepada *stakeholder* di di bidang pengelolaan kekayaan negara area pelayanan terpadu;
- b. Menyusun brosur/leaflet/banner tentang rekonsiliasi BMN, registrasi hibah, *e-auctoin*, pengurusan dan penyisihan piutang negara;
- c. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD serta *Quality Assurance* terkait pengelolaan kekayaan negara;
- d. Melibatkan SDM unit lain.

#### Isu Utama dan Implikasi:

Hasil survei atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk lingkup KPKNL Kisaran mencapai 4,89 dari target 4,75. Namun demikian Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Unit KPKNL Kisaran untuk kedepannya diprediksi akan mengalami kenaikan target. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat kepuasan pengguna layanan berpengaruh terhadap branding/reputasi KPKNL Kisaran dan organisasi DJKN secara menyeluruh.

#### Akar Masalah:

Menurut hasil survei, beberapa responden masih memberikan perspektif kepuasan dengan level cukup terhadap layanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan lelang dan Seksi PKN.

Berdasarkan *feedback* dari responden dan analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa area yang layak untuk dijadikan perhatian dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, khususnya layanan unggulan di Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi PKN.

Area yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Seksi Pelayanan Lelang antara lain:

1. Peningkatan pemberian layanan konsultasi kepada calon/pemohon lelang
2. Penyediaan informasi terkait lelang yang komprehensif

Sedangkan area yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Seksi PKN antara lain:

1. Frekuensi pelatihan BMN perlu ditambah untuk memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi terkait pelaporan BMN dan updating data BMN
2. Perlu adanya *taskforce* yang *standby* dengan durasi tertentu setelah jam kerja berakhir dalam rangka memberikan pelayanan di atas jam kerja
3. Pelatihan, sosialisasi dan FGD disarankan untuk direncanakan secara matang dan tidak mendadak, sehingga terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi satker yang diundang dalam mempersiapkan diri dan administrasinya
4. Informasi terbaru terkait dengan BMN maupun updating aplikasi BMN disarankan untuk di *share* kepada seluruh satker agar dapat cepat diketahui dan diinternalisasi di lingkup satker
5. Ruang APT (Area Pelayanan Terpadu) perlu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan kenyamanan bagi para stakeholder.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan FGD lelang pada bulan Februari 2020

2. Telah dilaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset pada Bulan Oktober 2020.
3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan satuan kerja pada Bulan Desember 2020.  
Rekomendasi rencana Aksi:
  1. Melaksanakan FGD lelang pada bulan Maret 2021
  2. Melaksanakan identifikasi dan mapping stakeholder pengguna layanan unggulan KPKNL Kisaran pada bulan Januari 2021
  3. Penyusunan Rencana Pelatihan/Sosialisasi/ FGD terkait pengelolaan BMN kepada satker pada bulan Januari 2021
  4. Penataan kembali Area Pelayanan Terpadu (APT) dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan APT pada bulan Januari 2021

#### 5. (3a-CP) Persentase hasil lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	57.685.000.000	35.926.818.286	62,28%

Pada tahun 2020, komponen IKU persentase hasil lelang diperoleh dari persentase realisasi jumlah pokok lelang dari KPKNL Kisaran dan Pegadaian.

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Sementara untuk bea lelang diperhitungkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Bea lelang yang diperhitungkan pada capaian IKU ini termasuk bea lelang pegadaian

Adapun target jumlah pokok lelang pada tahun 2020 pada KPKNL Kisaran adalah sebesar Rp57.685.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp35.926.818.286. KPKNL Kisaran sudah berupaya mengoptimalkan kinerja dari sumber daya yang ada pada seksi lelang dan jafung pelelang. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial dan adanya klinik konsultasi lelang secara tetap muka dan non

tatap muka demi meningkatkan koordinasi dengan antara KPKNL Kisaran dan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara serta Optimalisasi penggalan potensi lelang dan himbauan lelang *e-auction* secara berkesinambungan, hingga terwujudnya pelaksanaan lelang *e-auction* dengan frekuensi dan pokok lelang yang optimal menjadi kunci dalam keberhasilan pencapaian target lelang tersebut.

Tabel 3.3  
Rincian Capaian persentase hasil lelang

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
Pokok Lelang Kelas I	24.185.000.000	15.124.556.086	62,54%
Pokok Lelang Pegadaian	33.500.000.000	20.802.262.200	62,10%
<b>Rata-rata persentase</b>			<b>62,28%</b>

Dalam pencapaian tersebut khususnya pelaksanaan lelang di lingkup KPKNL Kisaran, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- Pandemi Covid 19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun
- Adanya kebijakan moratorium pelaksanaan lelang selama 2 bulan.
- Kurangnya jenis barang yang dijual lelang dengan potensi membentuk harga yang tinggi.
- Jumlah barang terjual masih lebih sedikit dibanding barang tidak ada peminat.
- Frekuensi lelang noneksekusi sukarela yang belum optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi melalui surat dan kunjungan ke beberapa instansi/perusahaan potensial untuk mengenalkan lelang kepada masyarakat.
- Melakukan sosialisasi dan penggalan potensi lelang kepada instansi yang dinilai potensial dan mempunyai pengaruh besar pada kegiatan bisnis di wilayah kerja KPKNL Kisaran.
- Melakukan sosialisasi dan penggalan potensi lelang kepada instansi yang memiliki barang dengan potensi nilai jual yang tinggi.
- Melakukan penyebaran pengetahuan tentang lelang kepada masyarakat.
- Melakukan sosialisasi melalui media surat dan kunjungan ke instansi-instansi mengenai penjualan lelang noneksekusi sukarela yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL.

Dalam mitigasi kendala yang mungkin timbul pada periode yang akan datang, langkah antisipatif yang dilakukan adalah:

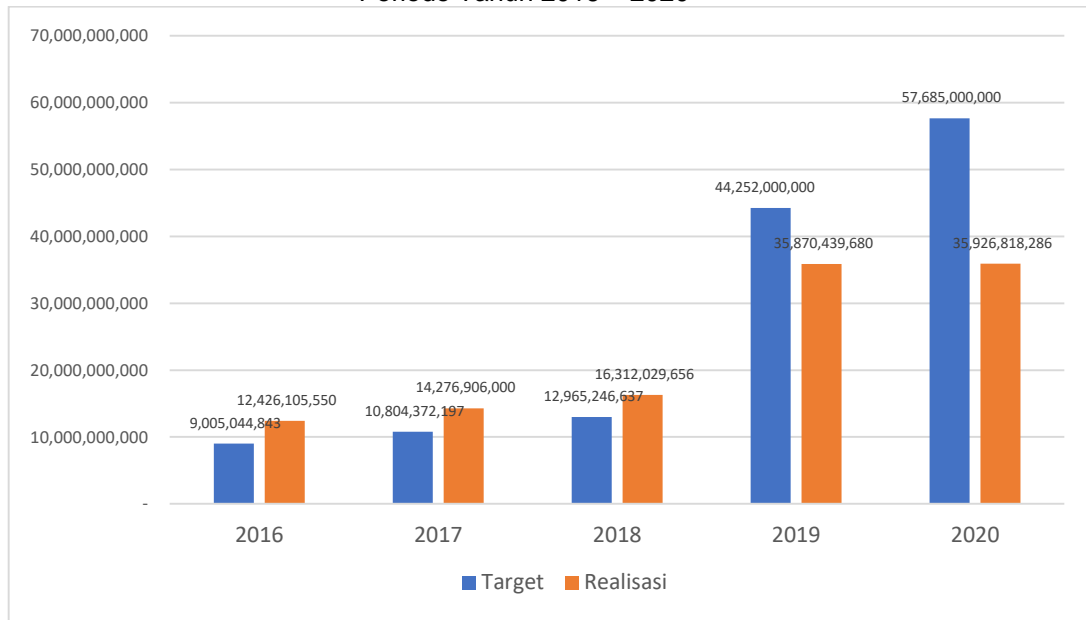
- a. Meningkatkan frekuensi sosialisasi lelang dengan memperluas sasaran sosialisasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sarana penjualan alternatif.
- b. Membuat target sosialisasi dan penggalian potensi lelang yang tepat sasaran, guna mendapatkan jumlah frekuensi lelang yang optimal selama tahun 2021.
- c. Melakukan pendekatan persuasif kepada calon pengguna jasa lelang yang potensial.
- d. Memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan dialog dengan masyarakat, khususnya mengenai kelebihan lelang agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa penjualan lelang.
- e. Memberikan perhatian lebih kepada calon pengguna jasa potensial jenis lelang noneksekusi sukarela, khususnya untuk pemohon BUMN, swasta perorangan dan badan hukum agar menggunakan lelang sebagai sarana penjualan aset/aktiva tidak aktifnya.
- f. Membangun database bidang lelang terkait kegiatan pembinaan, pengendalian mutu, dan pemeriksaan kinerja pejabat lelang.
- g. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan.
- h. Melakukan penggalian potensi lelang ke pengguna jasa pelayanan lelang perbankan maupun non perbankan, melakukan edukasi terkait lelang ke pengguna jasa lelang melalui sosialisasi pelaksanaan lelang khususnya lelang Hak Tanggungan, melakukan koordinasi dengan perbankan untuk menyampaikan rencana lelang yang berpotensi laku
- i. Meningkatkan koordinasi dengan perbankan untuk menyampaikan rencana lelang yang berpotensi laku per triwulan.

Data historis target dan realisasi IKU Pokok Lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.4  
Tabel Perbandingan Persentase Hasil Lelang  
Periode Tahun 2016 – 2020

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
Pokok Lelang	Target	9.005.044.843	10.804.372.197	12.965.246.637	44.252.000.000	57.685.000.000
	Realisasi	12.426.105.550	14.276.906.000	16.312.029.656	35.870.439.680	35.926.818.286
	(%)	137,99%	132,14%	125,81%	81,06%	62,28%

Gambar 3.5  
Diagram Perbandingan Persentase Hasil Lelang  
Periode Tahun 2016 – 2020



Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase hasil lelang sebesar 62,28%, oleh karena itu harus ditetapkan langkah-langkah preventif untuk meminimalisasi tidak tercapainya target lelang di tahun yang akan datang.
2. Untuk periode Tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang, sehingga perlu tetap dimitigasi langkah-langkah untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

Akar masalah: Potensi masalah tidak ada peminat (TAP)

Tindakan yang telah dilakukan:

- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan pemohon lelang pada bulan Februari 2020
- Menghimbau pemohon lelang untuk mengajukan barang yang *marketable*

Rekomendasi rencana aksi:

1. FGD Lelang pada minggu ketiga Februari 2021
2. Koordinasi dengan pemohon lelang pada bulan Februari 2021
3. Koordinasi dengan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara pada setiap bulan

## 6. (4a-CP) Rata-Rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara	85	98,7	116,12%

Waktu rata-rata penyelesaian permohonan *Standart Operating Procedure* (SOP) layanan unggulan di bidang pengelolaan kekayaan negara. Berdasarkan KMK Nomor: 35/KMK.01/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan terdapat 2 (dua) layanan unggulan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan 1 (satu) layanan unggulan di bidang piutang negara yaitu:

- SOP Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL;
- SOP Persetujuan / Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL;
- Pelayanan permohonan keringanan utang pada KPKNL.

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara pada tahun 2020 dengan target 85 dapat direalisasikan sebesar 98,7 sehingga capaian kinerja 116,12%. Capaian tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Target 2019 adalah 85 dengan capaian 95,92 (112,85%).

Dalam pengelolaan kekayaan negara, adanya peningkatan frekuensi permohonan pengelolaan kekayaan negara baik PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan maupun persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah/dan atau bangunan diseimbangkan dengan peningkatan kompetensi pegawai melalui FGD di bidang pengelolaan kekayaan negara. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kualitas dan kesadaran pelayanan prima SDM yang ada di Seksi PKN.

Sedangkan terkait dengan bidang piutang negara terdapat kendala :

- Minimnya usulan dari penyerah utang terkait keringanan utang (kegiatan tergantung dari pihak luar).

Dan sebagai tindak lanjut serta langkah antisipasi dalam menangani IKU ini khususnya terkait bidang piutang negara adalah :

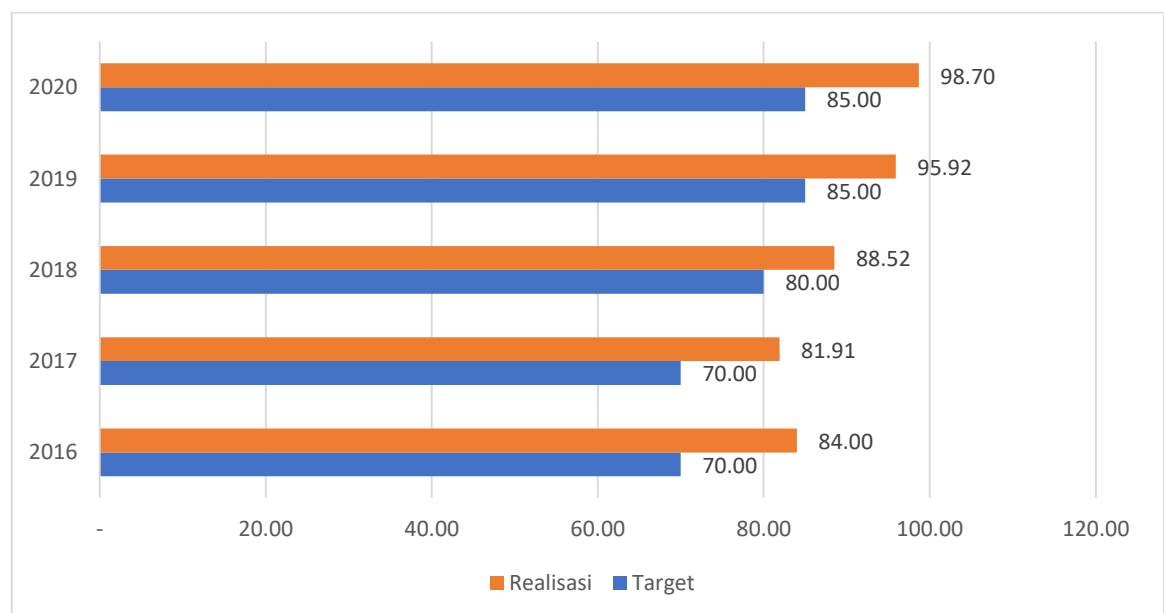
- a. Terkait laporan, KPKNL akan melakukan *review* kembali dan membuat resume secara lengkap terkait penanganan BKPn;
- b. Membantu proses pemeriksaan ke lapangan terkait barang jaminan dan penanganan BKPn (menyediakan perbantuan/pendampingan SDM ke satker).

Data historis target dan realisasi IKU Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam diagram di bawah ini:

Tabel 3.5  
Perbandingan Target dan Realisasi Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan Periode Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	70	70	80	85	85
Realisasi	84	81,91	88,52	95,92	98,7
Persentase (%)	120%	117,01%	110,65%	112,85%	116,12

Gambar 3.6  
Perbandingan Target dan Realisasi Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara Periode Tahun 2016 - 2019



Isu Utama dan Implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara sebesar 116,12%.
2. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara maka diperlukan adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan satker dan seksi terkait

Akar Masalah:

Potensi penyelesaian layanan unggulan melewati SOP

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melaksanakan FGD pengelolaan asset pada bulan Oktober 2020
2. Menyelesaikan layanan kekayaan negara lingkup kanwil secara tepat waktu

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset pada bulan April 2021
2. Melakukan internalisasi ke Seksi PKN untuk menyelesaikan layanan kekayaan Negara secara tepat waktu pada bulan Februari 2021

#### 7. (5a-CP) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Indikator Kinerja	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Kinerja
Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	50	17	21	123,53%

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan

5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan

6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Capaian persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2020 adalah 21 dari target (addendum) sebesar 17 atau capaian sebesar 123,53%. Jika dilihat dari sisi jumlah bidang tanah yang disertifikatkan, capaian ini sama dengan capaian di tahun 2019 yaitu sebanyak 21 bidang tanah. Hal ini karena data tanah yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP relatif terjaga validitasnya karena adanya dukungan dan sikap proaktif satuan kerja dalam penyajian data.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu satuan kerja belum menyajikan data yang benar dan tepat dalam aplikasi SIMANTAP, sehingga hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut yaitu :

- a. Melaksanakan rapat pembahasan BMN berupa tanah dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja;
- b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah; dan
- c. Melaksanakan rapat pembahasan BMN berupa tanah dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja.

Guna pencapaian yang lebih baik di tahun 2020, langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain:

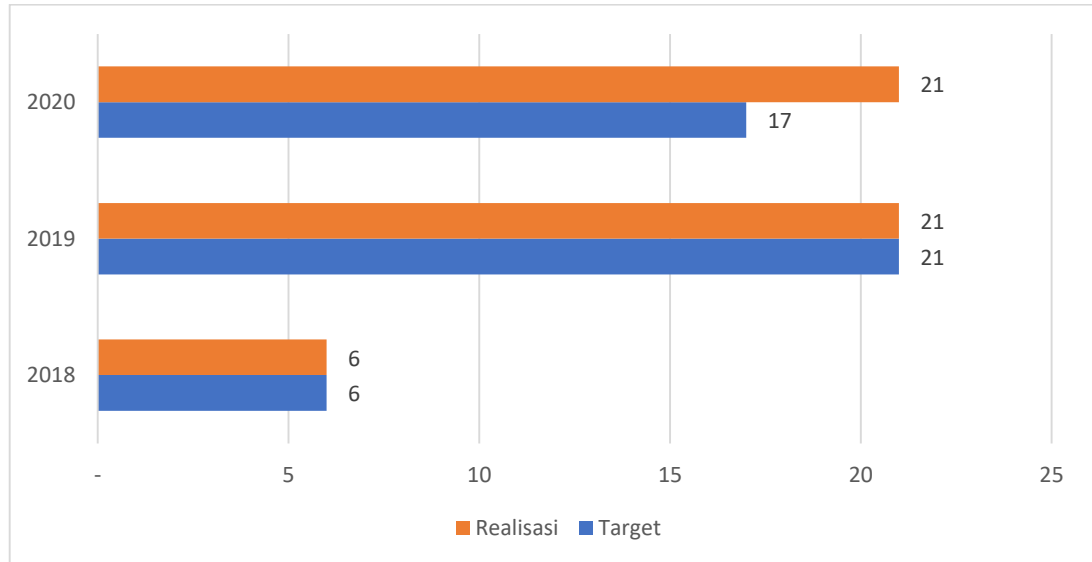
- a. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja wilayah untuk melakukan *updating* data SIMANTAP dan *update* aplikasi ke versi terbaru;
- b. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja untuk melaksanakan pemetaan dan inventarisasi terkait pengelolaan BMN berupa tanah Satuan Kerja.

Data historis target dan realisasi IKU persentase tanah BMN yang disertifikatkan pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2020 disajikan dalam table 3.5

Tabel 3.6  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2018 dengan 2020

Uraian	2018	2019	2020
Target	6	21	17 (addendum)
Realisasi	6	21	21
Kinerja (%)	100%	100%	123,53%

Gambar 3.7  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase tanah BMN yang disertipikatkan  
Tahun 2018 sampai dengan 2020



#### Isu Utama dan Implikasi:

Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 123,53%. Untuk periode Tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

#### Akar Masalah:

Seluruh rencana aksi yang direkomendasikan pada DKO periode triwulan III dan IV telah dilaksanakan, sehingga mampu mendukung capaian kinerja IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan secara optimal, dapat diakselerasi menjadi 21 sertipikat (melebihi target tahunan).

Selanjutnya, dalam rangka mencapai target sertipikasi tanah tahun 2021 yang lebih menantang, perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan Kantor Pertanahan, Kanwil BPN dan satker terkait.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a. KPKNL Kisaran telah menyusun mapping status progress sertipikasi (data rinci mengenai progress sertipikasi tanah berupa data tanah yang telah selesai sertifikasi, masih dalam proses, dan yang belum selesai).
- b. Koordinasi antara KPKNL Kisaran dan Kantor BPN pada Bulan Oktober 2020.

- c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tripartit dengan KPKNL, Kantor Pertanahan, dan satker terkait pada minggu pertama Bulan Oktober 2020 dalam rangka mapping sertipikasi tahun 2021

Rekomendasi rencana aksi:

- a. Mapping status sertipikasi periode tahun 2021
- b. Penyusunan Rencana Kerja Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah pada K/L Tahun 2021
- c. Penyusunan *trajectory*, *timeline* dan *monitoring progress* atas sertipikasi
- d. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan satuan kerja, kantor pertanahan dan satker terkait

#### 8. (5b-CP) Persentase efektivitas penyelesaian BKNP

Indikator Kinerja	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Kinerja
Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	15	8	10	106,25

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKNP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. IKU Persentase Efektivitas penyelesaian BKNP terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. BKNP dengan SP3N s.d. 31 Desember 2010 (Kategori I)
2. BKNP dengan SP3N tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019 (Kategori II)
3. BKNP dengan SP3N Tahun 2020 (Kategori III)

Pembobotan atas ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. BKNP dengan SP3N s.d. 31 Desember 2010 bobot 1,5
2. BKNP dengan SP3N tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019 bobot 1,0
3. BKNP dengan SP3N Tahun 2020 bobot 0,5

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKNP diukur dengan penjumlahan BKNP Lunas, BKNP Penarikan, BKNP dikembalikan, dan BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKNP target awal sebanyak 15 berkas BKNP yang kemudian dilakukan addendum/revisi menjadi 8 berkas BKNP.

Capaian Persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada Tahun 2020 selain *effort* yang luar biasa dari KPKNL Kisaran, juga merupakan buah keberhasilan dari sinergi antara KPKNL Kisaran dan penyerah utang melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Aplikasi Focus PN yang membantu KPKNL untuk memetakan prioritas BKPN yang diperkirakan cukup potensial guna menunjang capaian IKU;
- b. Pembinaan-pembinaan SDM pada KPKNL Kisaran terkait peraturan-peraturan tentang pengurusan Piutang Negara akurasi dan percepatan penyampaian data laporan sebagai salah satu instrument/alat ukur kinerja yang bersifat memberikan pedoman terhadap pengukuran kinerja dan efektivitas kegiatan KPKNL;
- c. Perbantuan SDM yang bersifat perbantuan langsung dalam upaya penagihan kepada penyerah utang dan juga perbantuan secara administrasi terkait pengelolaan BKPN.

Meskipun kinerja telah melampaui target, namun dari hasil evaluasi masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya

- a. Masih terdapatnya kesalahan dalam Pelaporan Realisasi bulanan, hal ini mengakibatkan tidak akuratnya pengukuran kinerja dan kesulitan menentukan prioritas kegiatan dalam capaian IKU;

Adapun tindak lanjut atas kendala-kendala tersebut adalah :

- a. Pembinaan-pembinaan SDM pada Sosialisasi pada SDM KPKNL Kisaran dan penyerah utang terkait peraturan-peraturan tentang pengurusan Piutang Negara;
- b. Verifikasi laporan dan penyediaan sistem untuk pengecekan;
- c. Prioritas kepada penyelesaian persuasif dengan menyusun prioritas debitur yang potensial dan penagihan secara langsung serta memanfaatkan media masa untuk melaksanakan panggilan kepada Penanggung Hutang.

Guna menghadapi IKU dimaksud pada tahun 2021, telah disusun rencana kerja sebagai bentuk mitigasi pencapaian target, yaitu:

- a. Mapping atas Piutang Negara
  - 1) Mapping dan profiling terhadap 18 debitur eks BPPN dimana pada saat ini KPKNL Kisaran telah menyurati Ditlantas Polda Sumatera Utara. Segera setelah surat dimaksud mendapatkan respon dari Ditlantas Polda Sumatera Utara akan ditindaklanjuti dengan mekanisme sesuai SE-01/KN/2020 tentang Percepatan Pengurusan Piutang Negara.

- 2) Mapping atas 6 debitur Kominfo, dimana pada saat ini KPKNL Kisaran telah melakukan PSBDT terhadap debitur dimaksud sesuai dengan PMK-163/PMK.06/2020 tentang Pengurusan Sederhana Piutang Negara.
  - 3) Mapping terhadap 5 debitur eks BPPN, dimana akan ditindaklanjuti dengan proses penagihan sederhana.
  - 4) Penggalian potensi piutang K/L dan pemerintah daerah secara lebih intensif.
- b. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara
- 1) Peningkatan kegiatan administrasi kegiatan pengurusan piutang negara dengan berkoordinasi dengan Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Sumatera Utara, berupa *Updating* data Focus PN, *Update* Kartu Monitor kegiatan PN dan Laporan kegiatan bulanan (Kepdirjen 207/2017);
  - 2) Sosialisasi peraturan terkait pengurusan piutang negara, peningkatan kualitas pelayanan SDM Piutang Negara.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN sebesar 106,25%.
2. Untuk periode Tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang, sehingga perlu dilakukan mitigasi untuk triwulan berikutnya agar kinerja tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Akar masalah:

Tantangan untuk meningkatkan pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dan penagihan piutang negara.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Koordinasi dengan penyerah Piutang telah dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020

Rekomendasi rencana aksi:

1. Koordinasi dengan penyerah Piutang
2. Mapping potensi piutang Negara dan penyusunan rencana kerja 2021

#### 9. (5c-CP) Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi	227.402.000.000	267.453.221.056	117,61

Utilisasi adalah peningkatan daya guna kekayaan negara melalui penetapan status penggunaan atas kekayaan negara yang belum digunakan secara optimal,

pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah; serta pemindahtangan melalui tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah. Kekayaan negara yang diutilisasi berasal dari BMN maupun kekayaan negara lain-lain yang belum digunakan secara optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengguna barang.

Nilai Kekayaan Negara Yang Diutilisasi pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 267.453.221.056 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rp227.402.000.000, dengan persentase capaian 117,61%. Hal tersebut antara lain merupakan hasil upaya dari penetapan status regular dan nilai kekayaan Negara yang diutilisasi.

Capaian nilai kekayaan negara yang diutilisasi tahun 2020 yang melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran satuan kerja akan pentingnya PSP dalam pengelolaan BMN, sehingga berbanding lurus dengan meningkatnya permohonan PSP BMN. Disamping itu, semakin meningkatnya wewenang dan tanggung jawab Kepala KPKNL dalam menetapkan surat keputusan/persetujuan pengelolaan BMN dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.06/2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tanggal 27 Juli 2016.

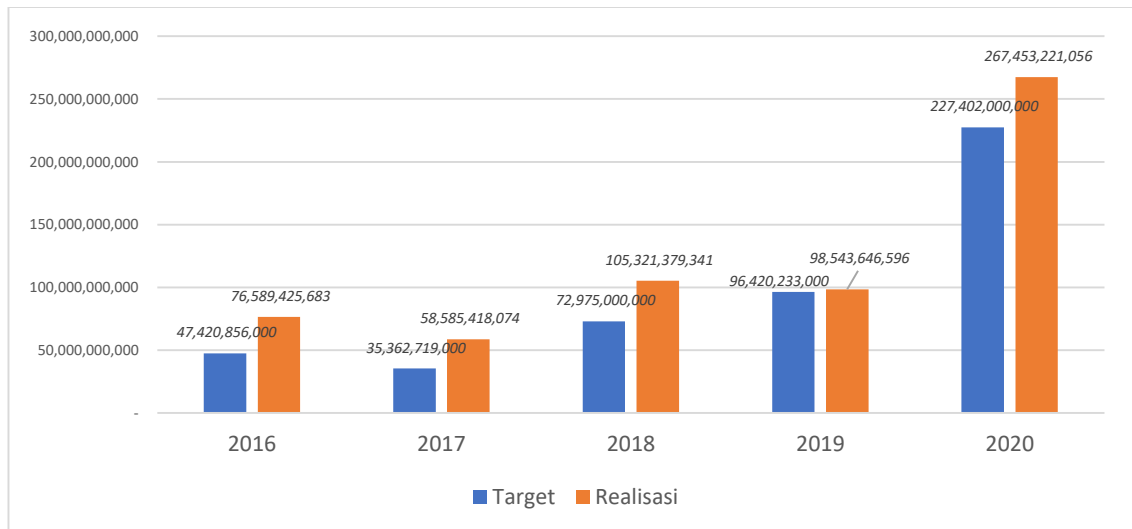
Adanya Keputusan Menteri PUPERA terkait pendelegasian kewenangan permohonan PSP, pemanfaatan dan pemindahtanganan kepada satuan kerja maupun penetapan status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga menjadi salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya pelaksanaan utilisasi pada Tahun 2020.

Data historis target dan realisasi IKU nilai kekayaan Negara yang diutilisasi pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 3.7  
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi  
Periode Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	47.420.856.000	35.362.719.000	72.975.000.000	96.420.233.000	227.402.000.000
Realisasi	76.589.425.683	58.585.418.074	105.321.379.341	98.543.646.596	267.453.221.056
Persentase (%)	161,51%	165,67%	144,33%	102,20%	117,61%

Gambar 3.8  
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi  
Periode Tahun 2016 sd. 2020



Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- c. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait penggunaan, sewa, penghapusan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan BMN;
- d. Potensi utilisasi dari PSP semakin berkurang;
- e. Intensitas pergantian operator SIMAK/SIMAN pada satuan kerja masih sering terjadi, sehingga dalam setiap periode pergantian operator, membutuhkan waktu bagi operator baru untuk menyesuaikan diri dan ritme dalam proses pengelolaan barang milik negara di lingkup satuan kerja masing-masing
- f. Masih adanya operator SIMAN/SIMAN yang berstatus Non-ASN pada satuan kerja yang mengakibatkan rendahnya tingkat ketertiban dan kepatuhan dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja yang bersangkutan

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- c. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan BMN, baik yang diselenggarakan oleh KPKNL maupun yang diselenggarakan oleh satuan kerja;

- d. Melakukan koordinasi dan himbauan kepada seluruh satuan kerja agar segera mengajukan permohonan PSP atas BMN baik BMN yang diperoleh pada tahun 2019 maupun BMN yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab penetapan PSP;

Langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2020 antara lain:

- c. Pembinaan kepada satuan kerja terkait esensi, syarat dan tata cara penetapan status penggunaan BMN;
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN;
- e. Penggalian potensi nilai kekayaan negara melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan BMN;

Isu Utama dan Implikasi:

4. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar 117,61%.
5. Capaian atas IKU Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi telah melebihi target *trajectory* (tahunan)
6. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait

Akar Masalah:

Mengingat IKU persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi mempunyai korelasi yang erat dengan pemahaman satuan kerja, maka Seksi PKN KPKNL harus selalu melakukan bimbingan/asistensi dan mitigasi guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

Telah dilaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN pada Bulan Oktober 2020

Rekomendasi rencana aksi:

Melakukan koordinasi dengan satker dalam rangka optimalisasi pengelolaan asset pada bulan Maret 2021

#### 10. (5d-CP) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Indikator Kinerja	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Kinerja
Persentase Implementasi	67	34	37	108,82%

Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
--	--	--	--	--

IKU Evaluasi kinerja BMN merupakan IKU baru di tahun 2020. IKU tersebut merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Melalui evaluasi kinerja BMN, diharapkan dapat mewujudkan struktur portofolio aset negara yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Capaian Evaluasi kinerja BMN tahun 2020 adalah 37 dari target (addendum) sebesar 34 atau secara persentase sebesar 108,82%. Namun mengingat IKU ini merupakan IKU baru, maka dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja belum menyajikan data yang benar dan tepat untuk disajikan dalam laporan Monev BMN, sehingga hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Satuan Kerja;
- b. Asistensi kepada satuan kerja

Guna pencapaian yang lebih baik di tahun 2020, langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain:

- a. Koordinasi via media daring dengan melibatkan satuan kerja;
- b. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja untuk melaksanakan pemetaan dan inventarisasi terkait pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing

Isu Utama dan Implikasi:

Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 108,82%. Untuk periode Tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Akar Masalah:

Seluruh rencana aksi yang direkomendasikan pada DKO periode triwulan III dan IV telah dilaksanakan, sehingga mampu mendukung capaian kinerja IKU Persentase

Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) secara optimal, dapat diakselerasi menjadi 37 aset (melebihi target tahunan).

Selanjutnya, dalam rangka mencapai target tahun 2021 yang lebih menantang, perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan satker terkait.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a. Telah dilaksanakan koordinasi antara KPKNL Kisaran dan satuan kerja pada minggu pertama Bulan Oktober 2020.

Rekomendasi rencana aksi:

- a. Sosialisasi dan asistensi kepada satuan kerja
- b. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan satuan kerja

#### 11. (6a-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0%	200%

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2020 adalah 0% dari target sebesar 30% atau secara persentase sebesar 200%. Hal tersebut berarti seluruh nilai yang dihasilkan dari proses penilaian KPKNL Kisaran digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

## 12. (7a-CP) Persentase produktivitas lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase produktivitas lelang	34%	48,34%	142,18%

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah dengan menetapkan jumlah frekuensi lelang dimana makin banyak frekuensi lelang maka potensi kontribusi penerimaan negara pun makin besar. Adapun indikator ini diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang selama tahun 2019.

Pada tahun 2020 target frekuensi lelang sebanyak 34% dan realisasi pelaksanaan lelang selama tahun 2020 berjumlah 48,34%. Frekuensi lelang berjumlah 364 kali dengan 177 yang lelang yang laku.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi sama dengan indikator kinerja terkait dengan persentase produktivitas lelang.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase produktivitas lelang sebesar 142,18%, namun demikian tetap diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisasi tidak tercapainya target lelang
2. Untuk periode Tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang, sehingga perlu dilakukan mitigasi untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

Akar masalah: potensi lelang TAP

Rekomendasi rencana aksi: koordinasi dengan pemohon lelang setiap bulan.

## 13. (7b-CP) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	99,45%	110,5%

*E-auction* merupakan pelaksanaan lelang oleh KPKNL dengan memanfaatkan teknologi internet. *E-auction* terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet). Perbedaannya yaitu ALI bersifat *real*

*time* dan terbuka. Pemanfaatan teknologi internet dalam pelaksanaan lelang ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal tersebut dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta dari seluruh pelosok (peserta tidak wajib hadir di tempat pelaksanaan lelang) dan dapat meminimalisasi kontak antar peserta lelang, maupun antara KPKNL dengan peserta lelang.

Implementasi *e-auction* mempunyai beberapa keunggulan antara lain: (i) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, (ii) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, (iii) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, (iv) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan (v) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Target persentase implementasi *e-auction* terhadap total pelaksanaan lelang tahun 2020 sebesar 90 % dari total frekuensi lelang sebanyak 364 dan terealisasi sebesar 99,45%.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase implementasi *e-auction* sebesar 110,5%.
2. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target trajectory maupun tahunan

Akar masalah: Adanya potensi resistensi pemohon lelang terhadap *e-auction*

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi lelang pada Bulan November 2020
2. Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang pada setiap pengajuan permohonan lelang

Rekomendasi rencana aksi:

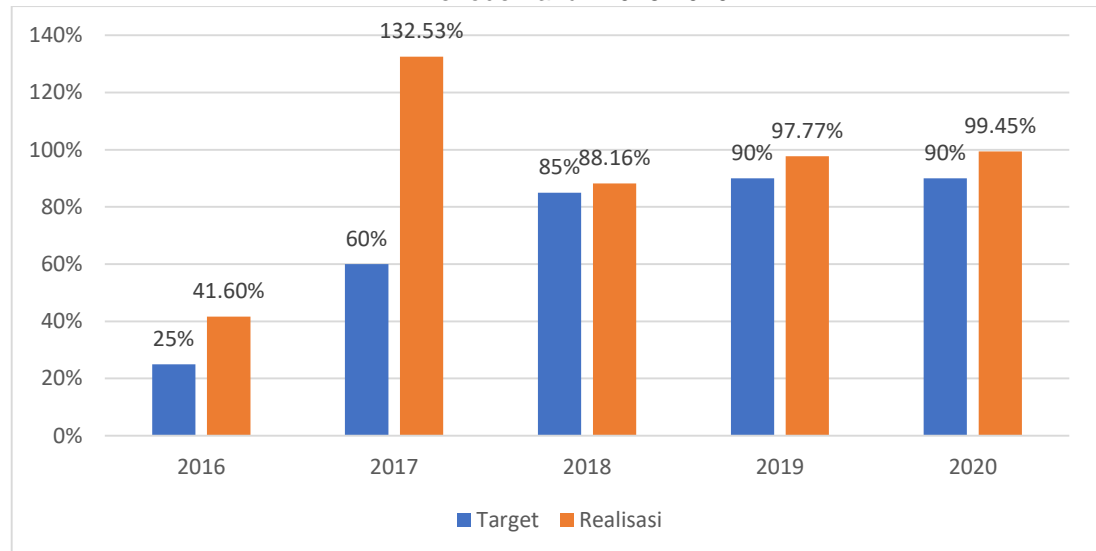
1. Koordinasi dengan pemohon lelang
2. Melaksanakan layanan konsultasi lelang secara intensif
3. Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon lelang maupun kepada masyarakat mengenai keuntungan mekanisme *e-auction*
4. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase implementasi *e-auction* pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.8  
Tabel perbandingan Realisasi Persentase implementasi *e-auction*  
Periode Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	25%	60%	85%	90%	90%
Realisasi	41,60%	132,53%	88,16%	97,77%	99,45%
Persentase (%)	166,40%	220,88%	103,72%	108,63%	110,5%

Gambar 3.9  
Diagram perbandingan Realisasi Persentase Implementasi *e-auction*  
Periode Tahun 2016-2020



#### 14. (8a-CP) Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	89	93,09	104,59%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Kisaran kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat,

dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- b. kualitas materi (bobot 15%),
- c. kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- d. kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Tahun 2020 target IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan indeks 89 dengan capaian sebesar 93,09 atau secara persentase adalah sebesar 104,59%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yaitu adanya perbedaan pemahaman peserta atas materi yang disampaikan oleh narasumber dan perbedaan kenyamanan selama pelaksanaan sosialisasi. Tindak lanjut yang diambil guna mengatasi kendala tersebut dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta dan dengan memanfaatkan ruang/gedung untuk sosialisasi yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap.

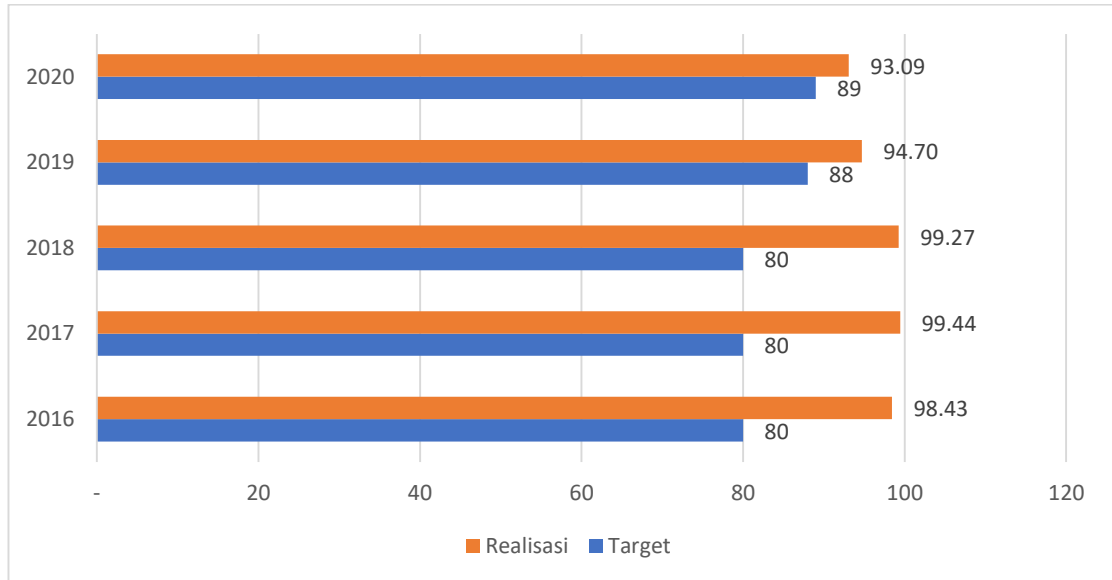
Langkah antisipatif yang diambil untuk periode mendatang dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin timbul untuk pencapaian target IKU ini dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta, penambahan acara/game yang menarik sebagai bagian dari penyegaran kembali peserta sosialisasi, serta melakukan penyusunan *pre-post test* atau *post test* untuk mengukur pemahaman peserta sosialisasi.

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.9  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi  
Periode Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	80	80	80	88	89
Realisasi	98,43	99,44	99,27	94,70	93,09
Persentase (%)	123%	124,3%	124,1%	107,6%	104,59%

Tabel 3.10  
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi  
Periode Tahun 2016 – 2020



Isu utama dan implikasi:

Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL, hal ini harus diminimalisir agar prosedur dan pendokumentasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akar masalah:

Kesalahan-kesalahan pada prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL berdasarkan hasil verifikasi dan analisa laporan pada KPKNL Kisaran

Tindakan yang telah dilakukan:

Monitoring dan evaluasi ke satuan kerja telah dilaksanakan oleh Subbagian Umum, Seksi PKN, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi PN, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan Informasi dan seksi Kepatuhan Internal pada periode November – Desember 2020

Rekomendasi rencana aksi:

1. Koordinasi pada rencana kerja dengan seluruh subbagian umum dan seksi
2. Focus Group Discussion Kepatuhan Internal

#### 15. (8a-N) Persentase tindak lanjut pengelolaan aset

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	80%	100%	125%
---	-----	------	------

Tindak lanjut pengelolaan aset dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan BMN yang baik. Untuk Pengelola Barang, tindak lanjut ini dilakukan meliputi kegiatan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, dan pemindahtanganan BMN.

Target yang ditetapkan IKU yaitu 80% dan realisasi yang berhasil dicapai 100% atau 125%.

Isu utama dan implikasi:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L, dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya.
2. Difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.
3. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase tindak lanjut pengelolaan aset sebesar 125%.
4. Capaian atas IKU persentase tindak lanjut pengelolaan aset telah melebihi target *trajectory* (tahunan)
5. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 dan meningkatkan kualitas kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan aset perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait

Akar masalah:

- Potensi satker tidak menindaklanjuti utilisasi atas aset yang telah diterbitkan DJKN
- Tingkat *awareness* satker untuk menindaklanjuti pengelolaan BMN masih rendah, dari sisi historis selama tahun 2020 terdapat satker yang lalai tidak menindaklanjuti dengan alasan nilai sewa terlalu tinggi dan ada juga yang membatalkan sewa kepada calon penyewa dengan alasan yang tiba-tiba pasca terbitnya persetujuan

Tindakan yang telah dilakukan:

Seksi PKN telah melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset pada Bulan Oktober 2020.

Rekomendasi rencana aksi:

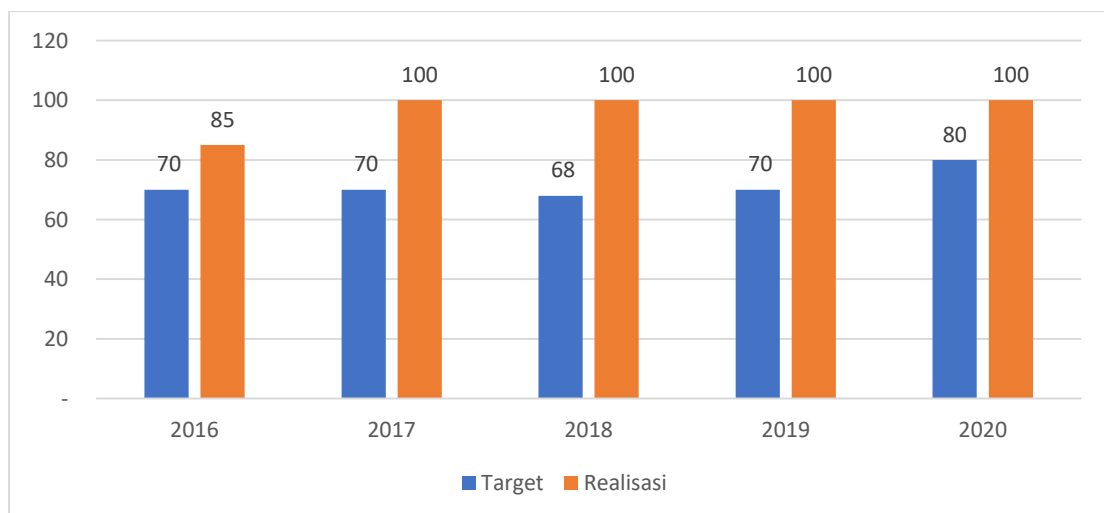
1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset bulan Maret 2021
2. Melakukan koordinasi ke satker secara berkesinambungan sejak awal tahun 2021 antara lain sewaktu satker berkonsultasi terkait pengelolaan asetnya.

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Aset pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2019 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.10  
Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Aset  
Periode Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	70	70	70	70	80
Realisasi	85	100	100	100	100
Persentase (%)	121,43%	142,86%	142,86%	142,86%	125%

Diagram 3.11  
Diagram Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Aset  
Periode Tahun 2016-2020



#### 16. (9b-CP) Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN	100%	100%	100%
---	------	------	------

IKU Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN adalah IKU baru di tahun 2020. IKU tersebut bertujuan untuk mewujudkan nilai asset negara yang akuntabel, akurat dan aktual melalui penilaian terhadap tindak lanjut atas obyek BMN kategori K1 yang wajib diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020. Jumlah objek BMN berbasis Nomor Urut Perlehan (NUP) BMN.

Tindak lanjut atas suatu objek dinyatakan selesai apabila status LHIP telah Selesai (tahap 9). Untuk tahun 2020, KPKNL Kisaran dibebani dengan target sebanyak 14 NUP. Dalam jangka waktu satu tahun, ke-14 NUP tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian pada akhir tahun adalah 100%

#### 17. (10a-N) Persentase pemenuhan kompetensi pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standard kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2020.

Pegawai yang memenuhi standard kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara Tugas/Fungsi Jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (Unit Eselon IV).

Pegawai yang memenuhi Standar Jamlat Program Pengembangan Pegawai adalah Pegawai yang telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK,1/2017 selama tahun

2019 dan dengan jumlah minimal jamlat yang telah di tentukan (akumulatif). Program Pengembangan Kompetensi dimaksud tidak terbatas hanya pada bidang teknis pegawai tersebut. Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:

I. Pengembangan Kompetensi Klasikal (Bimbingan Teknis, Kursus/Short-Course, Pelatihan, Penataran, Workshop, Sosialisasi, Seminar/Konferensi/Lokakarya, Sharing Session, Sarasehan)

II. Pengembangan Kompetensi Non Klasikal (Outbound, Studi Banding/Benchmarking, Belajar mandiri (self Study)/Membaca buku/Mempelajari Aturan, Pelatihan Jarak Jauh/E-learning, Bimbingan di tempat kerja (Coaching atau Mentoring), Secondment/Penugasan untuk mempelajari atau mengevaluasi proses bisnis di suatu unit kerja/Detasering/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Pertukaran Pegawai, Penugasan Sementara menduduki jabatan lain di luar jabatannya saat ini tanpa meninggalkan jabatan/tugas dan fungsi utamanya (contoh : menjadi Plh., Plt.), Taskforce/Project Assignment (Penugasan dalam suatu tim untuk menangani tugas atau proyek tertentu/penugasan terkait program prioritas), Mengajar/menjadi narasumber/Memberikan ilmu pengetahuan atau bimbingan pada pihak lain, Job Shadowing, Ekstrakurikuler (penugasan dalam aktivitas semi non-formal, misalnya menjadi ketua pekan olahraga instansi, koordinator acara peringatan hari keuangan, dan lainnya))

Pemenuhan standar kompetensi teknis dan standar minimal jamlat kegiatan pengembangan kompetensi pegawai minimum 24 jamlat (akumulasi).

Keikutsertaan pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dibuktikan melalui

a. Sertifikat

b. Surat keputusan/surat perintah yang mencantumkan jangka waktu pelaksanaan

c. Surat keterangan melaksanakan pengembangan kompetensi baik secara individual maupun kelompok diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian, dengan ketentuan:

1) pada kantor pusat diterbitkan paling rendah oleh pejabat eselon II;

2) pada kantor vertikal diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pada tahun 2020, di lingkungan KPKNL Kisaran persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target kinerja 100% atau dengan capaian 120%.

Meskipun telah mencapai target kinerja, namun masih terdapat area-area yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam menghadapi tantangan target di tahun 2020, antara lain :

- a. Pegawai tidak dapat/berhalangan mengikuti diklat yang sudah ditetapkan/disetujui;
- b. Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab/*hard competency* di bidangnya;
- c. Pembatalan beberapa diklat karena adanya penghematan anggaran.

Atas hal-hal tersebut telah disusun langkah antisipatif guna menghindari kendala yaitu:

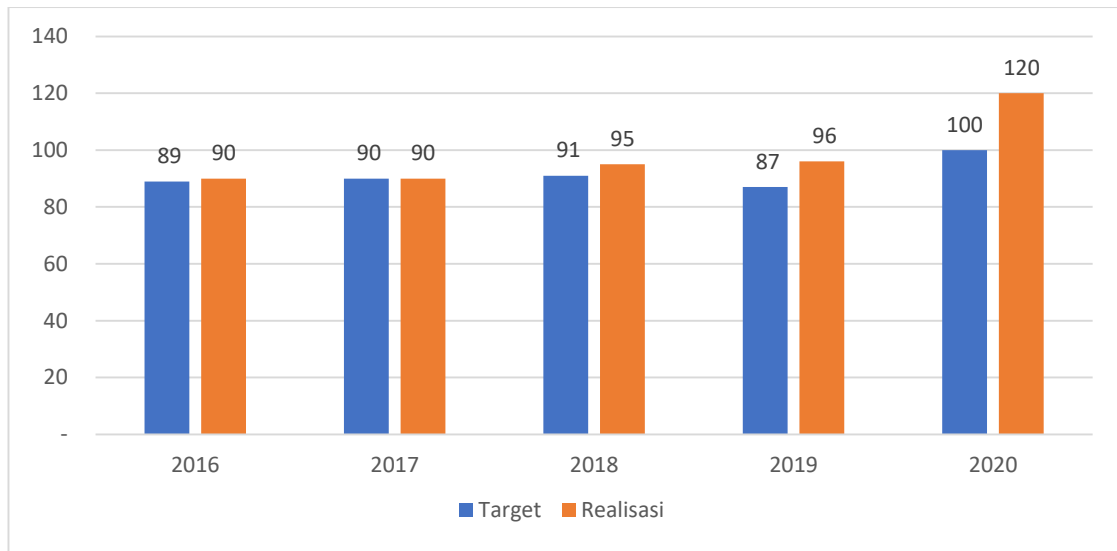
- a. Mengusulkan peserta diklat sesuai dengan *hard competency* masing-masing di seksi terkait;
- b. Memberikan pemahaman secara tertulis kepada setiap pegawai agar dapat memilih diklat yang akan diikuti sesuai *hard competency* di bidangnya;
- c. Rotasi internal pelaksana;

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.11  
Tabel perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai  
Periode Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	89	90	91	87	100
Realisasi	90	90	95	96	120
Persentase (%)	101,12%	100%	104,4%	110,34%	120

Gambar 3.12  
Diagram Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai  
Periode Tahun 2016-2020



### 18. (11a-N) Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja berbasis BSC

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	70	83,53	120%

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan system penilaian kinerja sebagai bagian dari system pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Keemnterian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah.

Review pengelolaan kinerja berbasis BSC dilaksanakan oleh Kanwil DJKN dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Isu utama dan implikasi:

1. Pengelolaan kinerja di KPKNL Kisaran harus dilaksanakan secara berkualitas
2. Pengelolaan kinerja di KPKNL Kisaran harus menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.
3. Pada tahun 2020 target meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2019 dengan target 70) dan diindikasikan bahwa trend target di tahun mendatang akan terus meningkat dan lebih menantang, oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah untuk mendukung pencapaian IKU tersebut.

Akar masalah:

- Meningat IKU review pengelolaan kinerja berbasis BSC merupakan IKU batu pada tahun 2020, maka substansi dan dokumen yang dibutuhkan dalam review belum diketahui.
- Masih rendahnya awareness pegawai KPKNL Kisaran terkait pengelolaan kinerja dan masih terdapat anggapan sebagian besar pegawai bahwa pengelolaan kinerja sepenuhnya merupakan tugas seksi KI. Namun sesuai KMK 467/KNK.01/2014, pengelolaan kinerja yang baik merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dimana terdapat kegiatan yang harus dilakukan sendiri oleh pegawai karena menyangkut hak-hak kepegawaian pegawai itu sendiri.
- Potensi pegawai yang tidak memahami IKU dan KK masing-masing
- Penyusunan manual IKU yang tidak tertib
- Kurang maksimalnya edukasi tentang pengelolaan kinerja di subbagian umum dan seksi di KPKNL Kisaran.

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Menyediakan layanan konsultasi penyusunan IKU
2. Menyusun brosur kinerja KPKNL Kisaran pada Bulan Januari 2020
3. Melaksanakan bimtek tentang pengelolaan kinerja ke seluruh seksi dan subbagian umum pada Minggu III Bulan November 2020.

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melaksanakan koordinasi kepada Bidang KIH Kanwil DJKN Sumatera Utara selaku SMKO guna mengetahui substansi dan dokumen pendukung dari review yang akan dilakukan
2. Menyusun rencana kerja yang memuat kegiatan dari aspek penilaian pengelolaan kinerja

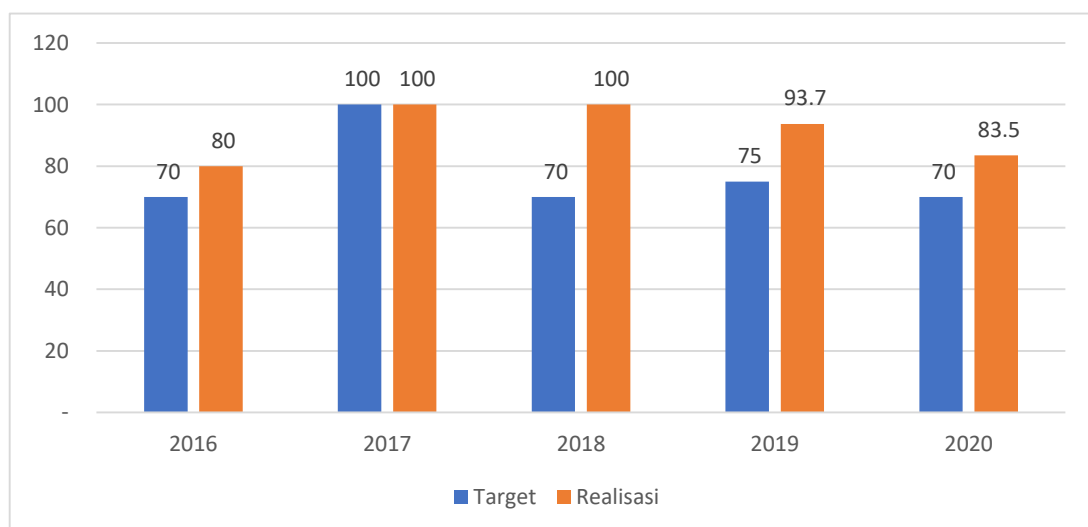
3. Melakukan internalisasi pengelolaan kinerja secara berkala (triwulanan)
4. Melakukan koordinasi dengan seksi Hukum dan Informasi dalam rangka publikasi terkait informasi pengelolaan kinerja
5. Menyusun bahan edukasi berupa video, infografis, poster yang eye catching dan menarik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kinerja yang telah disepakati bersama dalam DKO sehingga awareness dan kepatuhan para pegawai dapat ditingkatkan.

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.12  
Tabel perbandingan Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja  
Periode Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	70	100	70	70	70
Realisasi	80	100	100	93,72	83,53
Persentase (%)	114,29%	100%	142,86%	124,96%	120%

Gambar 3.13  
Diagram perbandingan Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja  
Periode Tahun 2016-2020



#### 19. (11b-N) Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	96,42	120,52%

Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD.

IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai merupakan IKU baru di tahun 2020, sehingga tidak terdapat data historis. Target Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai tahun 2020 sebesar 80. Berdasarkan kuesioner yang disebar, didapatkan nilai indeks sebesar 96,42, sehingga secara persentase capaian atas IKU tersebut adalah 120,52%.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai sebesar 120,52%.
2. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target trajectory maupun tahunan

Akar masalah: Tingkat pemahaman peserta yang berbeda-beda

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Mendistribusikan bahan dokumen FGD sebelum pelaksanaan FGD agar peserta bisa mempelajari isu yang akan dipaparkan
2. Membuka ruang diskusi setelah kegiatan FGD

3. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian target IKU dengan Subbag Umum secara periodisasi.
4. Menyusun timeline pelaksanaan FGD Kode Etik Pegawai

Rekomendasi rencana aksi:

1. Menyusun timeline pelaksanaan FGD Kode Etik Pegawai
2. Membuka ruang diskusi secara berkesinambungan

## 20. (12a-CP) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Anggaran	Kualitas Pelaksanaan		95%	98,53%	103,72%

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, efisiensi, dan pencapaian keluaran.

- a. Penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum.
- b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarasannya telah dicapai (pencapaian Output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian Output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak.
- c. Pencapaian keluaran adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan.

Adapun tujuan strategis dari IKU ini adalah untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan, efisiensi, dan pencapaian output. Dengan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Untuk pagu anggaran atas pagu Bruto TA 2020 adalah sebesar Rp2.876.242.000,00 dengan realisasi Rp2.833.948.979,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PAGU AKHIR	REALISASI	PENYE RAPAN
<b>Pagu Bruto</b>	<b>Rp2.876.242.000,-</b>	<b>Rp2.833.948.979</b>	<b>98,53%</b>
<b>Faktor Pengurang</b>			
a. Belanja Pegawai	Rp895.215.000,-	Rp894.555.360,-	-
b. Hasil Efisiensi	-	-	-
<b>Penyerapan Anggaran Netto</b>	<b>Rp1.981.027.000,-</b>	<b>Rp1.939.393.619,-</b>	<b>97,90%</b>

2. Capaian realisasi output KPKNL Kisaran tahun 2020 adalah 95%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELUARAN RIIL/SUB KELUARAN RIIL	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME
<b>1</b>	<b>Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	a. LBMN	2	2
	b. Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan BMN)	38	100
	c. Laporan Pengelolaan KNL	-	-
<b>2</b>	<b>Dokumen Pengurusan Piutang Negara</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
	- BKPN	8	10
	- Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang	-	-
	- Persetujuan/Penolakan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang	-	-
	- Bahan Pertimbangan dalam Pengurusan Piutang Negara	-	-
	- Surat/Risalah Bimbingan Teknis Pengurusan Piutang Negara	-	-
<b>3</b>	<b>Risalah Lelang</b>	<b>300</b>	<b>364</b>
	- Risalah Lelang	300	364
<b>4</b>	<b>Layanan Perkantoran (Selain Belanja Gaji dan Tunjangan)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

3. Penyerapan Anggaran KPKNL Kisaran mencapai 98,53% dari pagu, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
<b>Objek Efisiensi</b>			
1. Perjalanan Dinas	221.176.000	215.066.802	6.109.198
2. Rapat Dalam Kantor	-	-	-

URAIAN		PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
3.	Konsinyering/ Paket Meeting	-	-	-
4.	Kudapan dan Makan Siang Rapat	8.027.000	7.220.000	807.000
5.	Langganan Daya dan Jasa	148.140.000	138.003.214	10.136.786
6.	Honorarium Tim dan Narasumber	175.800.000	160.380.000	15.420.000
7.	Pengadaan Barang dan Jasa	351.446.000	351.446.000	-
8.	Belanja Operasional Perkantoran	819.672.000	811.651.162	8.020.838
9.	Belanja Jasa	-	-	-
10.	Belanja Pemeliharaan	254.766.000	254.636.441	129.559
11.	Belanja Lainnya	2.000.000	390.000	1.610.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.981.027.000</b>	<b>1.938.793.619</b>	<b>42.233.381</b>

4. Indeks kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Kisaran dihitung dari 4 komponen yaitu kesesuaian perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
<b>Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan</b>				
Revisi DIPA	100	0	0	100
Deviasi Hal III DIPA	91.06	0	0	
Pagu Minus	100	5	5	
<b>Kepatuhan terhadap Regulasi</b>				
Data Kontrak	0	0	0	94.33
Pengelolaan UP TUP	100	8	8	
LPJ Bendahara	83	5	4.15	
Dispensasi SPM	100	5	5	
<b>Efektivitas Pelaksanaan Anggaran</b>				
Penyerapan Anggaran	100	15	15	100
Penyelesaian Tagihan	0	0	0	
Konfirmasi Cap Output	100	10	10	
Retur SP2D	100	5	5	
<b>Efisiensi Pelaksanaan</b>				
Renkas	0	0	0	100
Kesalahan SPM	100	5	5	
Nilai Total				57.15
Konversi Bobot				58%
Nilai Akhir (NT/NB)				98.53

5. Selanjutnya dihitung juga nilai evaluasi kualitas anggaran/nilai EKA (SMART), dengan komponen sebagai berikut:

Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	<b>Nilai EKA</b>
98.53	99.59	100	8.52	<b>91.57</b>

Atas komponen-komponen tersebut, perhitungan realisasi atas indikator tersebut adalah:

INDIKATOR	Capaian	Bobot	Total
Nilai EKA	91,57	60%	54,942
Nilai IKPA	98,53	40%	39,412
<b>Realisasi Capaian IKU</b>			<b>94,354</b>

Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU diantaranya:

- pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN membutuhkan SDM, waktu, dan tenaga yang cukup banyak sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan yang lain dan pencapaian keluaran riil
- Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan baru dapat diakui setelah SPM GU menjadi SP2D.

Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran kepada seksi teknis
- Merevisi rencana pengeluaran dana atas pelaksanaan kegiatan

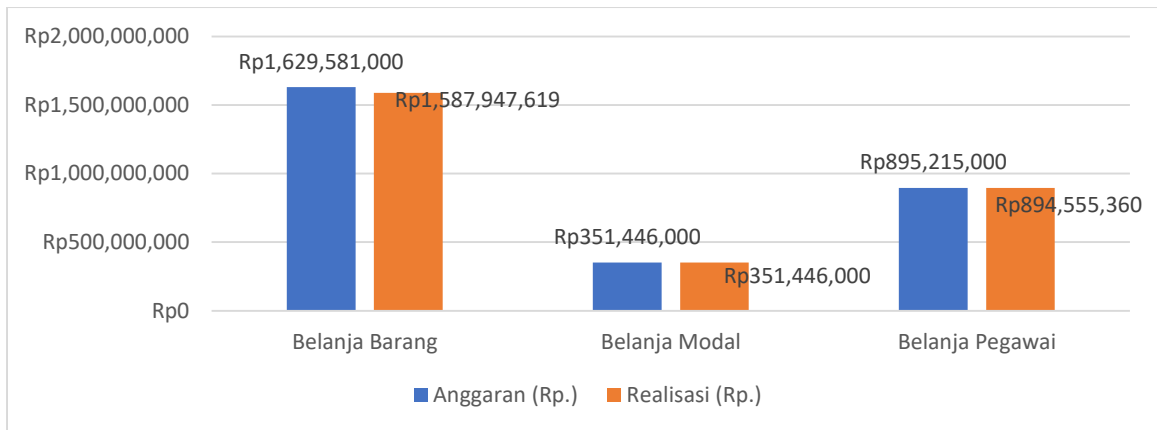
## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran yang merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi setelah dilakukan revisi, realisasi anggaran per jenis belanja pada KPKNL Kisaran tahun 2020 diilustrasikan pada tabel dan diagram di bawah ini:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Barang	1.629.581.000	1.587.947.619
Belanja Modal	351.446.000	351.446.000
Belanja Pegawai	895.215.000	894.555.360

Gambar 3.14

Diagram Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja TA 2020

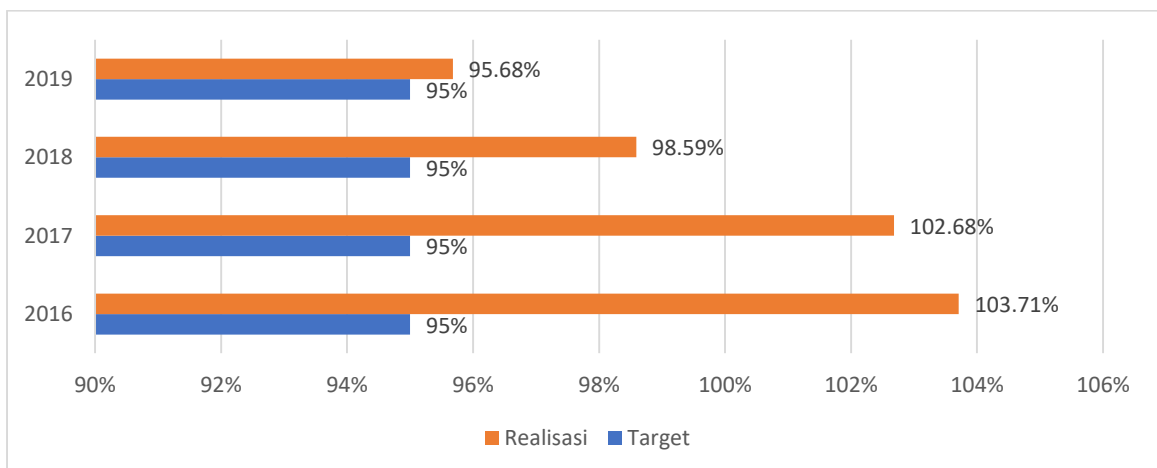


Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.13  
Tabel perbandingan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
Periode Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	95%	95%	95%	95%	95%
Realisasi	103,71%	102,68%	98,59%	95,68%	98,53%
Persentase (%)	109,17%	108,08%	103,78%	100,72%	103,72%

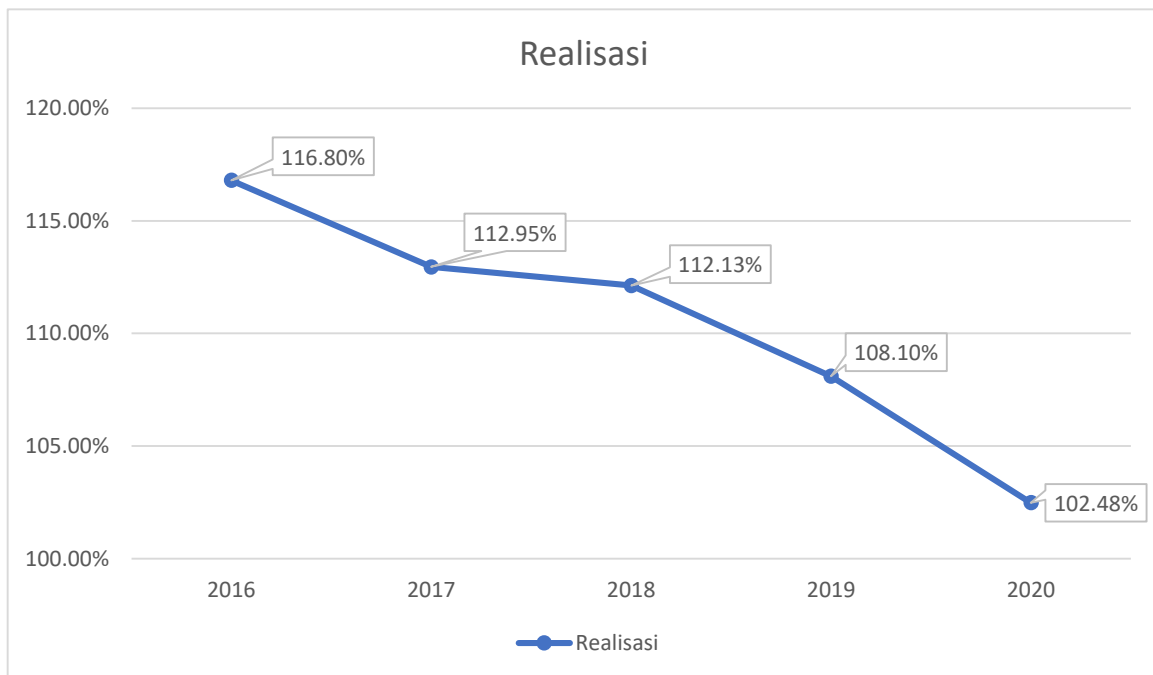
Gambar 3.15  
Diagram Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA Tahun 2016 - 2020



## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu *Three* KPKNL Kisaran Tahun 2020 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,48%.

Gambar 4.1  
Grafik Perbandingan NKO KPKNL Kisaran



Grafik pada gambar 4.1 mengilustrasikan perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2020. Selama kurun waktu tersebut, dari sisi tren NKO mengalami penurunan, namun demikian dari sisi target yang dibebankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari sisi sifat target juga lebih *challenging*. Dalam hal ini, KPKNL Kisaran selain selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dari sisi kualitas pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2020, KPKNL Kisaran menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Namun, kendala dan permasalahan tersebut masih dapat diatasi dengan dilakukannya penanganan segera terhadap permasalahan yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan secara umum dapat dicapai.

Sebagai unit vertikal DJKN, KPKNL Kisaran selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, masing-masing seksi/subbagian umum telah menyusun *mapping* dan *action plan*, dengan rincian sebagai berikut:

A. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Penggalan potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
3. Meningkatkan pelaksanaan frekuensi maupun kualitas *knowledge sharing* dan *focus group discussion* terkait pengelolaan kekayaan negara;
4. Meningkatkan penyediaan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN.

B. Seksi Pelayanan Penilaian

1. Peningkatan kapasitas Penilai yang dilakukan secara berkala;
2. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
3. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

C. Seksi Piutang Negara

1. Penggalan Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen dan tata cara penyerahan;
3. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

D. Seksi Lelang

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;
  2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dilingkup KPKNL Kisaran;
  3. Membangun database bidang lelang;
  4. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di seksi lelang;
  5. Koordinasi dengan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam rangka pemeriksaan risalah lelang dan pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
  6. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di seksi lelang;
  7. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang *via e-auction*.
- E. Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi
1. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko KPKNL Kisaran;
  2. Mengadakan forum kinerja dilingkup KPKNL;
  3. Peningkatan kegiatan pengendalian internal terhadap seluruh layanan KPKNL;
  4. Peningkatan pemantauan kode etik pegawai dan Area Pelayanan Terpadu KPKNL;
  5. Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas pada KPKNL sebagai sarana evaluasi peningkatan layanan KPKNL
  6. Melaksanakan konfirmasi kepada para stakeholder dalam rangka mitigasi risiko fraud
  7. Melaksanakan kegiatan sinergi yang lebih efektif antar seksi/subbagian umum;
- F. Seksi Hukum dan Informasi
1. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.
  2. Peningkatan penyediaan dan pemberian informasi public
  3. Peningkatan kualitas dan percepatan layanan kebendaharaan penerimaan
- G. Subbagian Umum
1. Optimalisasi analisis beban kerja dalam rangka pemetaan ketersediaan pegawai dan beban kerja masing-masing seksi/subbag umum
  2. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
  3. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
  4. Penajaman program dan kegiatan kerja;
  5. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2020.

Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2020 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Kisaran di periode yang akan datang, sehingga peran dan keberadaan KPKNL Kisaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

# **Kontrak Kinerja & Pengukuran Kinerja KPKNL Kisaran 2020**





**KONTRAK KINERJA  
NOMOR 9/KN 14/2020**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PETA STRATEGI**




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	95%
		1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,75 (Skala 5)
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85 (skala 100)
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**	100%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%
8.	Edukasi yang efektif	8a-CP	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
9.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%
10.	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)
		11b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)
12.	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan, Output, dan Indikator Output	Anggaran
1. Surat Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan BMN	Rp73.184.000
2. Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp7.338.000
3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	Rp9.672.000
4. Kajian Portofolio Aset**	Rp33.980.000
5. Dokumen pengurusan Piutang Negara	Rp10.235.000
6. Risalah lelang	Rp46.195.000
7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp379.480.000
8. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp19.996.000
9. Layanan Perkantoran	Rp3.378.566.000

Medan, 31 Januari 2020


Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Sumatera Utara,  
Tedy Syandrijadi  
NIP 19650829 199103 1 001Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Kisaran,  
Untung Sudarwanto  
NIP 19730227 199903 1 001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2020**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	5%	30%	30%	75%	75%	100%	100%
1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	99%	98%	98%	97%	97%	95%	95%
1a-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>2</b>	<b>Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien</b>							
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,75	4,75 (Skala 5)
<b>3</b>	<b>Pengelolaan lelang yang optimal</b>							
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Manajemen pelayanan yang berkualitas</b>							
4a-CP	Rata-rata Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85	85	85	85	85	85	85 (skala 100)
<b>5</b>	<b>Tata kelola kekayaan negara yang efektif</b>							
5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipkatkan	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Penilaian yang berkualitas</b>							
6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
<b>7</b>	<b>Tata kelola lelang yang efektif</b>							
7a-CP	Persentase produktivitas lelang	15%	20%	20%	25%	25%	34%	34%
7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional <i>auktion</i>	10%	30%	30%	50%	50%	90%	90%

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>8</b>	<b>Edukasi yang efektif</b>							
	8a-CP Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
<b>9</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>							
	9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	-	40%	40%	-	40%	80%	80%
	9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	10%	25%	25%	75%	75%	100%	100%
<b>10</b>	<b>SDM yang kompeten</b>							
	10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>11</b>	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>							
	11a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	-	-	-	-	-	70	70 (skala 100)
	11b-N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
<b>12</b>	<b>Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal</b>							
	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Medan, 31 Januari 2020

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Kisaran,

  
Untung Sudarwanto  
NIP 197302271999031001

## Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Tedy Syandriadi	1	Nama	Untung Sudarwanto
2	NIP	19650829 199103 1 001	2	NIP	19730227 199903 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda / IV.c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk. I / IV.b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
2	Mengurangi nilai <i>outstanding</i> piutang negara	-	5%	100	12 bulan	-
3	Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	-	100%	100	12 bulan	-
4	Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4,75 (Skala 5)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan hasil lelang (Pokok lelang)	-	100%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan layanan kekayaan negara dan lelang dengan tepat waktu	-	85 (skala 100)	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan BKP	-	100%	100	12 bulan	-
9	Menetapkan nilai kekayaan negara yang djutilisasi	-	100%	100	12 bulan	-
10	Menerapkan evaluasi kinerja BMN**	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan ketergunaan hasil penilaian	-	70%	100	12 bulan	-
12	Meningkatkan produktivitas lelang	-	34%	100	12 bulan	-
13	Mengimplementasikan e-auction dan e-conventional <i>auktion</i>	-	90%	100	12 bulan	-
14	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	80%	100	12 bulan	-
16	Menindaklanjuti penyelesaian/perbaikan atas Sisa Aset Objek Penilaian Kembali BMN	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan pengelolaan kinerja berbasis BSC yang baik	-	70 (skala 100)	100	12 bulan	-
19	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran	-	95%	100	12 bulan	-

Pejabat Penilai,



Tedy Syandriadi  
NIP 19650829 199103 1 001

Medan, 31 Januari 2020

PNS yang Dinilai,



Untung Sudarwanto  
NIP 19730227 199903 1 001

**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	...	..				
2	dst	...				

Medan, 31 Januari 2020  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Kisaran,

  
Untung Sudaryanto  
NIP 19730227 199903 1 001

## Pengukuran Kinerja KPKNL Kisaran 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	54,57%	54,57%
	Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%	31,95%	1065%
	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	100%
Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75	4,89	102,95%
Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	62,28%	62,28%
Manajemen pelayanan yang berkualitas	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85	98,70	116,12%
Tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase bidang tanah yang disertifikatkan	100%	123,53%	123,53%
	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	106,25%	106,25%
	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	117,61%	117,61%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	100%	108,82%	108,82%
Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0%	200%
Tata kelola lelang yang efektif	Persentase produktivitas lelang	34%	48,34%	142,18%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	98,82%	109,80%
Edukasi yang Efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	89	93,09	104,59%
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	100%	125%
	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN	100%	100%	100%
SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
Organisasi yang fit-for purpose	Nilai hasil rewiu pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	83,53	119,33%
	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	96,42	120,52%
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,53%	103,72%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020 : Rp2.876.242.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020 : Rp2.833.948.979,00



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**

Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 4, Jalan P. Diponegoro nomor 30A Medan Kotak Pos 20152  
TELEPON : (061) 452.4000, FAKSIMILI (061) 453.8636, EMAIL : kanwiljknsumut@depkeu.go.id

Yth. Kepala KPKNL Kisaran  
Jalan Prof. Moh Yamin, SH Nomor 47  
Kisaran 21222

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : SP- 13 /WKN.02/2020

No	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Adendum Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Kisaran Tahun 2020	1 (satu) set	Dengan hormat dikirimkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor, 05 OCT 2020

Tedy Syandriadi

Tembusan :  
Kepala Bidang Kepatuhan internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sumatera Utara.

## ADENDUM KONTRAK KINERJA

NOMOR: 9A/KN.14/2020

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Kontrak Kinerja Nomor: 9/KN.14/2020 tanggal 31 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama dan Target							
	Sebelum				Menjadi			
1b-CP	Tingkat Outstanding Piutang Negara (Polarisasi <i>minimize</i> )				Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Polarisasi <i>maximize</i> )			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	99%	98%	97%	95%	0,5%	1%	2%	3%

### B. Perubahan target dan/atau *trajectory*

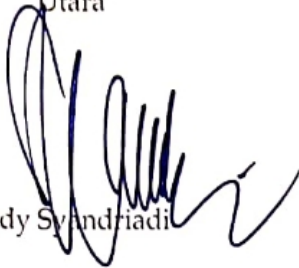
Kode IKU	IKU	Sebelum				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok lelang)	10%	30%	60%	100%	10%	30%	50%	100%
1c-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	25%	50%	75%	100%	-	50%	75%	100%
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN/portofolio aset	25%	50%	80%	100%	-	50%	80%	100%
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/pebaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	10%	25%	75%	100%	5%	25%	75%	100%

#### Catatan:

1. Perubahan IKU, target tahunan, dan target *trajectory* IKU mengacu pada Peraturan yang berlaku terkait Pandemi Covid-19.
2. Adendum KK ini mulai berlaku pada triwulan I tahun 2020.

Medan, Agustus 2020

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera  
Utara

  
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Kisaran

  
Untung Sudarwanto

## Perubahan manual IKU

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1. PNBP Pengelolaan BMN Rp 3.348.378.000 2. PNBP Biad PPN Rp 3.000.000 3. PNBP Lelang Rp 1.653.000.000  Total Raw Data Target Rp 5.004.378.000	1. PNBP Pengelolaan BMN Rp 2.444.315.940 2. PNBP Biad PPN Rp 7.500.000 3. PNBP Lelang Rp 1.653.000.000  Total Raw Data Target Rp 4.104.815.940
1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	214 NUP	167 NUP
1b-CP	Tingkat penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp 1.916.637.018.21 b. Proyeksi penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp 95.831.850.91 (5% dari Rp 1.916.637.018.21) sehingga di akhir tahun 2020 ditargetkan Tingkat <i>Outstanding</i> Piutang Negara sebesar 95%	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp 1.916.637.018.21; b. Target penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp 57.499.110.55 (3% dari Rp 1.916.637.018.21)
5a-CP	Persentase Bidang tanah yang disertifikatkan	50 Bidang ( <i>raw data target</i> )	17 Bidang ( <i>raw data target</i> )
5b-CP	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	15 BKPN ( <i>raw data target</i> )	8 BKPN ( <i>raw data target</i> )

5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN/portofolio aset	67 NUP	34 NUP																		
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	<p>1834 NUP</p> <p>Formula:            Jumlah NUP K1 yang status LHIP selesai :            Jumlah NUP K1 x 100%</p>	<p>14 NUP</p> <p>Formula:  <math>[(NUP\ S1 \times 10\%) + (NUP\ S2 \times 20\%) + (NUP\ S3 \times 30\%) + (NUP\ S4 \times 40\%) + (NUP\ S5 \times 60\%) + (NUP\ S6 \times 70\%) + (NUP\ S7 \times 80\%) + (NUP\ S8 \times 90\%) + (NUP\ S9 \times 100\%)] : Total\ Target\ NUP \times 100\%</math></p> <p>Keterangan :</p> <table border="1" data-bbox="997 840 1300 1254"> <tr> <td>S1 (Status 1)</td> <td>Persiapan</td> </tr> <tr> <td>S2 (Status 2)</td> <td>Cek Fisik</td> </tr> <tr> <td>S3 (Status 3)</td> <td>Update Data</td> </tr> <tr> <td>S4 (Status 4)</td> <td>Kirim LHI ke KPKNL</td> </tr> <tr> <td>S5 (Status 5)</td> <td>Penilaian Selesai</td> </tr> <tr> <td>S6 (Status 6)</td> <td>Pengajuan LHIP ke KPKNL</td> </tr> <tr> <td>S7 (Status 7)</td> <td>LHIP Selesai</td> </tr> <tr> <td>S8 (Status 8)</td> <td>Pengiriman BAR</td> </tr> <tr> <td>S9 (Status 9)</td> <td>BAR Selesai</td> </tr> </table>	S1 (Status 1)	Persiapan	S2 (Status 2)	Cek Fisik	S3 (Status 3)	Update Data	S4 (Status 4)	Kirim LHI ke KPKNL	S5 (Status 5)	Penilaian Selesai	S6 (Status 6)	Pengajuan LHIP ke KPKNL	S7 (Status 7)	LHIP Selesai	S8 (Status 8)	Pengiriman BAR	S9 (Status 9)	BAR Selesai
S1 (Status 1)	Persiapan																				
S2 (Status 2)	Cek Fisik																				
S3 (Status 3)	Update Data																				
S4 (Status 4)	Kirim LHI ke KPKNL																				
S5 (Status 5)	Penilaian Selesai																				
S6 (Status 6)	Pengajuan LHIP ke KPKNL																				
S7 (Status 7)	LHIP Selesai																				
S8 (Status 8)	Pengiriman BAR																				
S9 (Status 9)	BAR Selesai																				